

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu paham, ideologi dan teori tertentu tentang perubahan sosial. Pada umumnya, pembangunan atau *development* dijadikan sebagai suatu proses, visi maupun teori yang diyakini oleh semua negara (Fakih, 2013).

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan lainnya yang terjadi dalam suatu masyarakat menuju kearah yang lebih baik atau yang dicita-citakan. Sementara itu, proses dari perubahan itu sendiri harus memperhatikan dua hal dasar yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), kedua hal tersebut memiliki keterkaitan yang menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Hatu, 2013).

a. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development*, yang berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama yang diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat di dorong untuk memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya. Pemberdayaan masyarakat terkait erat faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergitas dan dinamis. Faktor internal merupakan salah satu wujud *self organizing* dari masyarakat (Mardikanto, 2010a).

commit to user

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah (1) sebuah kesepakatan pembangunan baru yang dibuat untuk mengganti *Mellenium Development Goals* (MDGs). Sementara itu, masa berlaku SDGs ialah selama 15 tahun (2015-2030), (2) dokumen tersebut terdiri dari 35 halaman yang berisi kesepakatan dan tandatangan dari 190 negara di dunia, (3) isi dari dokumen tersebut terdiri dari 17 tujuan yang akan dicapai dan 169 sasaran pembangunan, dari 17 tujuan dengan 169 sasaran yang dicantumkan dalam dokumen tersebut diharapkan dapat menjawab masalah yang terkait dengan ketertinggalan pembangunan negara-negara diseluruh dunia, baik di negara maju maupun negara-negara berkembang (Hoelman *et al.*, 2015).

Sustainable Development Goals (SDGs) dirumuskan pada tanggal 25 September 2015. Pembangunan tersebut berkelanjutan sampai pada tahun 2030. *Sustainable Development Goals* (SDGs) disusun berdasarkan tujuan pembangunan millennium. Tujuan tersebut meliputi (1) peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin, penjaminan akses terhadap pelayanan dasar dan perlindungan bagi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana, (2) menjamin bahwa masyarakat dapat menikmati makanan yang sehat dan bernutrisi sepanjang tahun, (3) membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur, (4) meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, (5) mengatasi masalah kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, (6) memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi, (7) memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pembaharuan energi, (8) menciptakan pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, (9) memastikan bahwa infrastruktur yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk setiap orang, (10) mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, (11) memposisikan inti

pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi, (12) mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya, (13) mensosialisasikan cara menghadapi dampak dari pemanasan global, (14) melindungi pantai dan lautan, (15) melindungi sumber daya alam, (16) menjaga keamanan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah bekerja secara adil dan efektif, (17) bekerjasama pada tingkat global untuk mencapai SDGs dan mewujudkan agenda pasca-2015 yang telah disetujui (UCLG, 2017).

b. Pembangunan berpusat pada rakyat (*people centered development*)

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai perubahan yang meliputi perubahan pada proses ekonomi, sosial serta politik yang kemudian proses tersebut dikombinasikan untuk meraih kehidupan yang lebih baik *United Nations* (1972) dalam (Hikmat, 2014). Hal yang lebih ditekankan dalam pembangunan berpusat pada rakyat ialah pemberdayaan manusia melalui peningkatan kapasitas, di mana kapasitas tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri, yaitu dengan melakukan pengelolaan sumber daya yang ada. Selain mampu menciptakan sumber kehidupannya dan secara langsung mampu untuk ikut serta dalam pembangunan nasional yang diprogramkan sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan sebagai wujud realisasi tujuan akhir dari *people centered development* McGinty (2002) dalam (Purwowibowo, 2018).

Model pendekatan pembangunan berpusat kepada rakyat menekankan pada pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan serta posisinya dalam tatanan ekonomi internasional. Korten (1993) dalam Hikmat (2014) mengatakan bahwa pusat dari konsep pembangunan ialah ada pada rakyat yang memiliki sikap inisiatif, dan kreatif, terlebih merupakan sumber daya pembangunan yang

commit to user

utama yang memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai pada proses pembangunan.

Korten mengemukakan tiga tema penting sebagai penentu konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat: (1) penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha swadaya warga miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka, (2) kesadaran bahwa sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi konvensional, namun sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan masyarakat miskin, (3) kebutuhan akan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan bagi para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber daya lokal.

Moeljarto Tjokrowinoto dalam Mardikanto (2010b) memberikan deskripsinya mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat:

- 1) Pertama, harus meletakkan prakarsa dan proses pengambilan keputusan tahap demi tahap pada masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan.
- 2) Kedua, peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka merupakan fokus utama dari pembangunan.
- 3) Ketiga, pendekatan ini mentoleransi keragaman lokal dan bersifat fleksibel, dalam arti mampu disesuaikan dengan kondisi lokal.
- 4) Keempat, di dalam melaksanakan pembangunan, hal yang ditekankan dalam pendekatan ini ialah proses sosial *learning* yang di dalamnya terdapat interaksi antara birokrasi dan komunitas, mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek.

- 5) Kelima, bagian integral dari pendekatan ini terdiri dari proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber daya. Serta menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal.

2. Pemberdayaan masyarakat

a. Definisi

Menurut Djohani dalam Anwas (2014), pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk membangun keseimbangan dengan cara memberi daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*). Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, pemberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan pada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur dirinya sendiri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Jim Ife (2008) mengatakan bahwa “*empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skill to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and effect of their community*”. Menurut Chambers konsep pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial sehingga mampu mencerminkan paradigma pembangunan yang mempunyai sifat “*people-centered*”, *participatory, empowering and sustainable*. (Jolly, 2012).

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan *commit to user* usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan

lingkungan, perbaikan kehidupan, perbaikan masyarakat. Dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga upaya pokok yang dirumuskan oleh Sumadyo dalam Mardikanto (2010a) yang disebut dengan tri bina, yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Berkaitan dengan rumusan tersebut, Mardikanto menambahkan bahwa bina kelembagaan sangat penting, karena ketiga bina tersebut hanya akan terwujud seperti yang diinginkan jika didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

b. Lingkup pemberdayaan masyarakat

Sumadyo dalam Mardikanto (2010a), merumuskan lingkup pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

1) Bina manusia

Merupakan upaya yang pertama dan utama dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun upaya pengembangan atau penguatan meliputi: (a) pengembangan kapasitas individu yang terdiri dari kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja dan kapasitas kepribadian, (b) pengembangan kapasitas entitas atau kelembagaan yang meliputi kejelasan visi, misi dan budaya organisasi, kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan struktur organisasi, proses organisasi atau pengelolaan organisasi, pengembangan jumlah dan mutu sumber daya, interaksi antar individu di dalam organisasi, interaksi dengan entitas organisasi dengan *Stakeholders*, dan (c) pengembangan sistem jejaring yang meliputi pengembangan interaksi antar entitas dalam sistem yang sama, pengembangan interaksi dengan entitas atau organisasi di luar sistem.

2) Bina usaha

Bina usaha mencakup: (1) pemilihan komoditas dan jenis usaha, (2) studi kelayakan dan perencanaan bisnis, (3) pembentukan badan usaha, (4) perencanaan investasi dan

penetapan sumber-sumber pembiayaan, (5) pengelolaan SDM dan pengembangan karir, (6) manajemen produksi dan operasi, (7) manajemen logistik dan finansial, (8) penelitian dan pengembangan, (9) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis, (10) pengembangan jejaring dan kemitraan (11) pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

3) Bina lingkungan

Lingkungan internasional, sejak tahun 2007 telah menetapkan ISO 26000 yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Sedangkan yang termasuk dalam tanggung jawab sosial ialah segala kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam di sekitar kawasan, maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal atau perseroan. Termasuk tanggung jawab lingkungan adalah terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4) Bina kelembagaan

Kata kelembagaan sering dikaitkan dengan dua istilah, yaitu *social instruction* atau pranata sosial dan *social organization* atau organisasi sosial. Sebuah kelembagaan dapat berdiri apabila memiliki empat komponen, yang meliputi (1) komponen person, (2) komponen kepentingan, (3) komponen aturan, (4) komponen struktur. Selain itu, kelembagaan memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen, (2) kelembagaan berkaitan dengan hal-hal yang abstrak dalam menentukan perilaku, (3) berkaitan dengan perilaku, (4) kelembagaan menekankan pada pola perilaku yang

disepakati dan memiliki sanksi, (5) kelembagaan memiliki cara-cara yang standar untuk pemecahan masalah.

c. Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- 1) Pertama, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki.
- 2) Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan hambatan yang dirasakan, yang pada akhirnya harus mengambil keputusan.
- 3) Ketiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- 4) Keempat, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaatnya.
- 5) Kelima, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan untuk mengembangkan motivasi-motivasi dalam melakukan perubahan.
- 6) Keenam, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
- 7) Ketujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

d. Indikator keberdayaan

Mardikanto (2010a), mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya perbaikan mutu kehidupan masyarakat. Indikator dalam pencapaian mutu tersebut, meliputi:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*), perbaikan pendidikan yang dimaksud adalah perbaikan dalam hal menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), dengan semangat belajar seumur hidup diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya.

- 3) Perbaikan tindakan (*better action*), perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dan sumber daya yang lebih baik, akan menghasilkan tindakan yang lebih baik juga.
 - 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*), dengan perbaikan tindakan maka akan memperbaiki kelembagaan termasuk jejaring kemitraan.
 - 5) Perbaikan usaha (*better business*), perbaikan pendidikan, aksesibilitas, tindakan dan kelembagaan pastinya akan memperbaiki usaha atau bisnisnya.
 - 6) Perbaikan pendapatan (*better income*), seiring dengan perbaikan bisnis maka akan memperbaiki pendapatan seseorang, keluarga ataupun masyarakat.
 - 7) Perbaikan lingkungan (*better environment*), dengan bertambahnya pendapatan, diharapkan kerusakan lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial dapat diperbaiki, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh faktor kemiskinan.
 - 8) Perbaikan kehidupan (*better living*) semakin bertambahnya pendapatan, level kehidupan individu maupun masyarakat juga akan semakin meningkat.
 - 9) Perbaikan masyarakat (*better community*), kehidupan yang lebih baik dan di dukung oleh lingkungan baik dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik.
- e. Pendekatan pemberdayaan masyarakat

Pendekatan pemberdayaan masyarakat menurut Anwas (2014), meliputi:

- 1) Pendekatan *top down*

Top down merupakan pendekatan yang segala keputusan dan kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat lebih bersifat pasif, yaitu menerima segala sesuatunya dari pusat. Pendekatan ini memiliki kelemahan,

antara lain masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasinya ataupun gagasannya, tidak mengetahui jalannya program dan cenderung banyak yang kecewa dengan pembangunannya karena tidak sesuai dengan harapannya.

2) Pendekatan *button up*

Button up, adalah perencanaan pembangunan di mana masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan, dari awal pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator pembangunan. Kelemahan pendekatan *button up* peran pemerintah tidak optimal, sering terjadi kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat karena berbeda pandangan dan hasil pembangunan belum tentu baik.

f. Ragam pemberdayaan masyarakat

1) *Rapid Rural Appraisal* (RRA)

Rapid Rural Appraisal (RRA) merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat. Kegiatan RRA biasanya lebih banyak dilakukan oleh masyarakat luar dengan sedikit melibatkan masyarakat setempat. Chambers (1980) dalam Mardikanto (2010b) menyatakan bahwa RRA merupakan teknik penilaian yang relatif terbuka, cepat dan bersih (*fairly-quickly-clean*) dibandingkan teknik-teknik lain yang berupa sekadar kunjungan yang dilakukan secara singkat oleh seorang ahli dari kota.

Participatory Rural Appraisal (PRA) atau penilaian desa secara partisipatif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PRA meliputi:

- a) Pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian.
- b) Analisis keadaan yang berupa: keadaan masa lalu, masa sekarang, dan di masa depan. Selain itu, mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dan faktor penyebabnya,

yang meliputi kegiatan seperti mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi alternatif terhadap pemecahan masalah serta melakukan analisis SWOT terhadap semua alternatif pemecahan masalah.

c) Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang dapat di andalkan.

d) Rincian tentang *Stakeholders* terkait peran, jumlah dan sumber-sumber pembiayaan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang akan diusulkan atau direkomendasikan.

2) *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok yang terarah

Sebagai suatu metode pengumpulan data, FGD merupakan interaksi antar individu (10-30 orang) di mana proses interaksi tersebut akan diarahkan oleh moderator. FGD dirancang dalam beberapa tahapan, yaitu: (a) Perumusan tujuan jelas dari FGD, utamanya tentang isu pokok yang akan didiskusikan, sesuai dengan tujuan kegiatan, (b) Persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, (c) Identifikasi dan pemilihan partisipan, yang terdiri dari para pemangku kepentingan kegiatan atau narasumber yang berkompeten, (d) Persiapan ruangan diskusi, (e) Pelaksanaan diskusi (f) Analisis data (hasil diskusi), (g) Penulisan laporan hasil FGD.

3) *Participatory Learning and Action* (PLA) atau proses belajar dan praktik secara partisipatif.

Participatory Learning and Action (PLA) merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang sebuah topik. Melalui kegiatan PLA diharapkan dapat memperoleh beragam manfaat, seperti:

a. Segala pertanyaan dapat dijawab.

- b. Masyarakat setempat memperoleh banyak pengetahuan yang berbasis pengalaman yang dibentuk dari lingkungan kehidupan mereka.
- c. Masyarakat akan melihat bahwa mereka lebih mampu untuk mengemukakan masalah dan solusi yang tepat dibanding pihak dari luar.
- d. *Participatory learning and action* dapat memainkan peran sebagai penghubung antara masyarakat setempat dengan lembaga yang diperlukan.

4) Sekolah lapangan (*farmers field school*)

Farmers Field School (FFS) merupakan pertemuan secara berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, saling mengeluarkan pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*) terkait alternatif dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien. Sekolah lapangan difasilitasi oleh fasilitator atau nara sumber yang berkompeten.

5) Pelatihan partisipatif

Berbeda dengan kegiatan pelatihan konvensional. Pelatihan partisipatif dirancang sebagai implementasi metode Pendidikan Orang Dewasa (POD), dengan ciri utama, yaitu: (a) hubungan instruktur atau fasilitator dengan peserta didik tidak lagi bersifat vertikal tetapi bersifat lateral atau horizontal, (b) lebih mengutamakan proses dari pada hasil, dalam arti keberhasilan pelatihan tidak diukur dari seberapa jauh terjadi alih-pengetahuan, tetapi seberapa jauh terjadi interaksi atau diskusi dan berbagi pengalaman (*sharing*) antara sesama peserta maupun antara fasilitator dan pesertanya.

g. Manfaat yang didapat dari pemberdayaan masyarakat

Dampak dari pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang diterima. Manfaat yang diterima (*beneficiaries*) menurut Mardikanto (2010b) meliputi:

- 1) Masyarakat memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, fasilitator dan pemangku kepentingan pembangunan lain.
- 2) Ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan kerja dalam mensukseskan pembangunan.
- 3) Memiliki posisi di mana mereka akan dihargai ketika menerima atau menolak inovasi yang disampaikan fasilitatornya.
- 4) Memiliki kedudukan yang setara dan bahkan lebih tinggi kedudukannya.
- 5) Proses belajar bukanlah bersifat vertikal melainkan proses belajar bersama yang partisipatif.

Adapun penerima manfaat dari pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- 1) Pelaku utama, terdiri dari warga masyarakat.
- 2) Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah sebagai perencana, pelaksana dan pengendali kebijakan pembangunan.
- 3) Pemangku kepentingan lain, antara lain: peneliti atau akademisi, produsen dan peralatan, pelaku-pebisnis, pers, aktivis LSM dan tokoh masyarakat, budayawan, artis, dan sebagainya .

h. Fasilitator pemberdayaan masyarakat

Peran fasilitator pemberdayaan masyarakat adalah membentuk masyarakat dalam hal mengidentifikasi isu, masalah dan kebutuhan, serta memfasilitasi upaya pemecahan masalah. Prinsip yang digunakan oleh fasilitator adalah prinsip saling beremansipasi. Dalam hal ini, fasilitator lebih berperan sebagai pendamping, bukan *problem solver* (pihak yang memecahkan masalah). Kegiatan

pendampingan sosial berpusat pada tiga visi praktik pekerjaan sosial, yang sering disebut dengan 3P, yaitu pemungkin (*enabling*), pendukung (*supporting*), dan pelindung (*protecting*) (Zubaedi, 2014). Peran fasilitator sebagai pemungkin (*enabling*) menurut Mardikanto (2010a) meliputi:

- 1) Peran edukasi, berperan sebagai pendidik dalam arti mengembangkan proses belajar bersama dan terus menanamkan pentingnya belajar sepanjang hayat kepada masyarakat.
- 2) Peran diseminasi inovasi, yaitu menyebarluaskan inovasi atau informasi dari luar kepada masyarakat atau sebaliknya.
- 3) Peran fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan dan menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain.
- 4) Peran konsultasi, yaitu sebagai penasihat atau pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 5) Peran *advocacy*, yaitu memberikan peran bantuan yang berkaitan dengan rumusan atau pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- 6) Peran *supervise*, yaitu peran sebagai penyelia (*supervisor*) pelaksanaan kegiatan *advocacy* dan pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- 7) Peran pemantau (*monitoring*) dan evaluasi, yaitu peran untuk melakukan pengamatan, pengukuran dan penilaian pada proses dan hasil pemberdayaan masyarakat, baik *on going*, formatif dan setelah kegiatan dilakukan *expost* atau sumatif.

i. Kualifikasi fasilitator

- 1) Kemampuan berkomunikasi; kemampuan dan ketrampilan fasilitator untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat.

- 2) Sikap fasilitator; menghayati dan merasa bangga terhadap profesinya, meyakini bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji kemanfaatannya, menyukai dan mencintai masyarakat.
- 3) Pengetahuan fasilitator tentang isi, manfaat, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan. Latar belakang dan keadaan masyarakat dan segala sesuatu yang menjadi penyebab warga masyarakat suka atau tidak menghendaki terjadinya perubahan.
- 4) Karakteristik sosial-budaya fasilitator

Jika seorang fasilitator akan ditugaskan di wilayah kerja yang memiliki kesenjangan sosial budaya maka ia harus berusaha untuk menyiapkan diri dan berusaha terus menerus untuk mempelajari dan menghayati nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Model pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat menempatkan para fasilitator dan kelompok yang diberdayakan dalam posisi setara atau timbal balik dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan pendampingan ialah untuk mewujudkan terjadinya transfer kendali kepada masyarakat agar mampu memecahkan masalah secara mandiri dan berkesinambungan.

j. Pemberdayaan sektor pendidikan

Perilaku masyarakat menurut Benyamin Bloom dapat dikategorikan menjadi tiga aspek, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ketiganya aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan dimanifestasikan dalam perilaku manusia. Program wajib belajar 9 tahun ternyata belum dapat terlaksana 100%.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam mendidik remaja, diantaranya adalah kesadaran para orang tua untuk menyekolahkan anak masih sangat rendah. Selain itu, tuntutan ekonomi juga berat, tidak jarang orang tua mengajak anak-anaknya untuk membantu mereka untuk bekerja mencari nafkah. Harapannya,

melalui upaya pemberdayaan ini dapat membangun kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Upaya pemberdayaan pada remaja, tidak hanya dilakukan pada jalur pendidikan formal saja, tetapi juga dilakukan pada jalur pendidikan non formal. Pendidikan non formal yang dimaksud antara lain dengan adanya kursus-kursus maupun pelatihan-pelatihan ketrampilan.

Adapun bentuk ketrampilan yang akan diberikan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal. Sebagai contoh, jika remaja tersebut berasal dari keluarga bermata pencaharian dengan bertani atau tergolong masyarakat bertani, maka dilakukan pelatihan yang berhubungan dengan pengolahan hasil pertanian, serta cara memasarkannya.

Sebaliknya, jika remaja yang bersangkutan berasal dari masyarakat perkotaan, maka dapat dilakukan kursus atau ketrampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan diperlukan kerjasama dari berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah setempat, dunia usaha, swasta dan masyarakat luas (Anwas, 2014).

3. *Stakeholder*

Stakeholder dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki beberapa kepentingan yang berbeda dan dapat dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik atau tujuan Wijaya dan Pratama, (2008) dalam (Aulia, 2016).

Macam-macam *Stakeholder* antara lain (1) *government* atau pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hukum, serta undang-undang dalam wilayah tertentu, (2) masyarakat merupakan kelompok yang membentuk sistem yang bersifat semi tertutup atau terbuka dan saling terbuka antar individu dalam kelompok tersebut, (3) swasta merupakan individu atau kelompok yang digunakan sebagai

commit to user

sarana perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada keikutsertaan pemerintah (Aulia, 2016).

Peran *Stakeholder* dalam peningkatan promosi kesehatan khususnya tentang kesehatan reproduksi sangatlah penting. Pemerintah merupakan salah satu *Stakeholder* penggerak utama dalam jaringan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), yang mana kegiatan PKPR ini meliputi antara lain peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, pencegahan resiko pernikahan dini, penanggulangan kenakalan remaja serta pencegahan penyakit menular seksual dan HIV AIDS. PKPR mempunyai tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kesehatan remaja.

Pemerintah memiliki kewenangan serta merupakan bagian dari birokrasi formal, baik birokrasi yang berada dibawahnya maupun berada di atasnya. Namun dalam usaha meningkatkan kesehatan reproduksi secara komprehensif masih banyak membutuhkan keterlibatan berbagai *Stakeholder* terkait. Peran *Stakeholder* adalah untuk memberikan dukungan kepada organisasi karena *Stakeholder* merupakan bagian yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Kunci dari kewenangan dan tanggung jawab *Stakeholder* antara lain (1) sebagai pemimpin dalam organisasi, (2) memberikan seluruh kemampuannya untuk digunakan dalam perencanaan dan hasil suatu program, (3) membuat dan sekaligus menjaga hubungan dengan semua *Stakeholder*, (5) mengkoordinasikan serta mengoptimalkan seluruh kemampuan yang berkualitas dari individu di dalamnya untuk keuntungan organisasi, (6) melakukan penilaian atau evaluasi berkala pada organisasi dalam melaksanakan tugasnya (Muthmainnah, 2016).

4. Peran

Teori peran (*role theory*) merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu yang lain. Selain psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Ketiga ilmu tersebut mengambil istilah “peran” dari dunia teater. Posisi

aktor dalam teater (sandiwara) dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Definisi peran menurut Biddle dan Thomas adalah pemegang kedudukan tertentu, yang perilakunya dibatasi oleh serangkaian rumusan (Sarwono WS, 2013).

Dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi istilah dalam teori peran dalam empat golongan: (a) orang-orang yang mengambil peran dalam interaksi sosial, (b) perilaku yang muncul dalam interaksi tertentu, (c) kedudukan orang-orang dalam perilaku, (d) kaitan antara orang dan perilaku. Menurut Biddle dan Thomas terdapat lima istilah tentang perilaku yang berkaitan dengan peran:

a. *Expectation* (harapan)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas dan yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. *Norm* (norma)

Menurut Secord dan Backman (1964) dalam Sarwono (2013) “norma” merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis harapan menurut Secord dan Backman antara lain:

- 1) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang perilaku yang akan terjadi.
- 2) Harapan *normative*, terbagi dalam dua jenis (1) harapan yang terselubung (*covert*): harapan yang tetap ada walaupun tidak diucapkan atau dapat disebut juga dengan nama *norm*, (2) harapan yang terbuka (*overt*): harapan yang diucapkan, dan harapan ini yang dinamakan dengan tuntunan peran (*role demand*).

c. *Performance* (wujud perilaku)

Wujud perilaku peran dapat digolongkan ke dalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencarian nafkah, pemeliharaan ketertiban dan sebagainya. Perwujudan peran ini menurut Sarbin, intensitas keterlibatan diri (*self*) seorang aktor

dapat diukur berdasarkan tingkat intensitas keterlibatannya. Tingkat intensitas terendah adalah di mana seorang aktor tidak pernah terlibat. Sedangkan tingkat tertinggi ialah jika seluruh kepribadian dalam perilaku peran sedang dikerjakan. Sedangkan Goffman mengemukakan definisi peran dari sudut pandang yang berbeda (*front*), yaitu menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar dapat diketahui oleh orang lain dengan jelas peran si pelaku (*actor*).

d. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi)

Penilaian dan sanksi terdiri dari dua jenis, yang meliputi: Penilaian dan sanksi dari dalam diri sendiri (*internal*) dan dari luar (*terbuka/eksternal*), penilaian dan sanksi dari dalam (*internal*) yaitu pelaku sendirilah yang akan menilai diri sendiri dan memberikan sanksi pada diri mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan harapan-harapan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Sedangkan penilaian dan sanksi terbuka (*eksternal*) didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*).

5. Sekolah

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan peserta didik dan masyarakat. Pendidikan adalah sebuah proses di mana peserta didik dilatih dengan pengalaman belajar yang telah dirancang untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, khususnya melalui sekolah formal *Webster's New World Dictionary* dalam (Sagala 2013).

Sekolah menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dapat juga diartikan sebagai jalur pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan

umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan pendidikan khusus. Jalur pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat (Kemendikbud RI, 2003).

Adapun indikator perkembangan siswa di sekolah tingkat menengah pertama antara lain: (1) mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa, (2) mampu mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat, (3) menciptakan hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita, (4) memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas, (5) mengenal kemampuan bakat dan minat menuju arah karier dan apresiasi, (6) mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan mempersiapkan karier serta berperan dalam kehidupan masyarakat, (7) mengenal gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial dan ekonomi, (8) mengenal sistem etika dan nilai-nilai sebagai pedoman hidup (Danim dan Khairil, 2014).

Pemberdayaan sekolah adalah salah satu cara untuk mewujudkan peningkatan sumber daya masyarakat, sehingga tidak berorientasi pada kepentingan kapitalisme. Prinsip pemberdayaan yaitu dengan memberikan otonomi yang luas kepada lembaga, seperti lembaga satuan pendidikan dalam memecahkan masalah yang terjadi di lembaganya sendiri. Sekolah yang memiliki otonomi mandiri dapat merencanakan, menyusun program, melaksanakan program, mengevaluasi program, dan melakukan umpan balik serta membuka ruang kreativitas, inovasi, dan sejumlah pembaruan sekolah (Sagala, 2013).

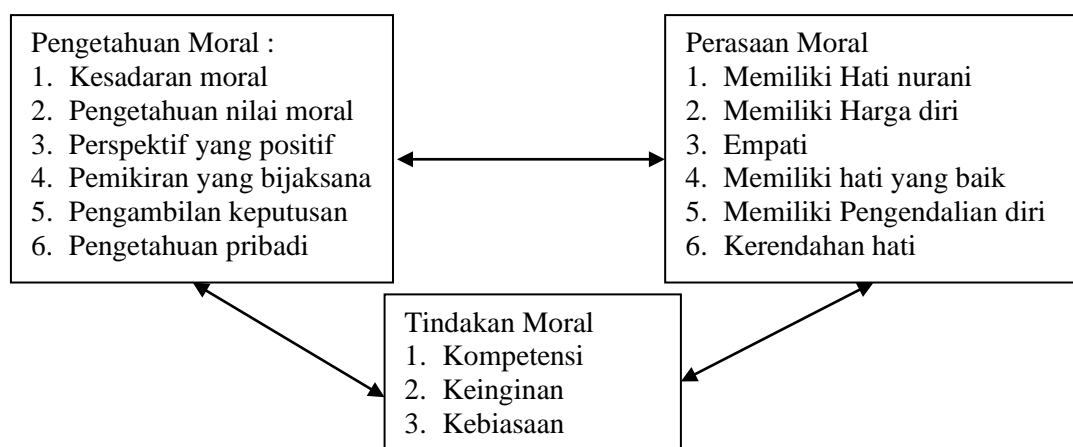
Pemberdayaan terhadap lembaga satuan pendidikan sebagai pusat pembelajaran, pendidikan, dan kebudayaan dapat dikatakan berhasil jika,

(1) tersedia lembaga pendidikan yang bervariasi dan di dalamnya terikat oleh visi dan misi pendidikan nasional, (2) jumlah lembaga pendidikan yang semakin efisien yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, (3) lembaga pendidikan yang didukung oleh organisasi yang efektif dan efisien, (4) mutu, sarana, dan prasarananya semakin meningkat dan iklim pembelajaran semakin kondusif bagi peserta didik, (5) tingkat kemandirian lembaga satuan pendidikan semakin tinggi (Supriadi, 2001).

6. Pendidikan karakter

Pengertian karakter menurut Michael Novak, adalah kombinasi dari semua kebaikan yang diidentifikasi dengan tradisi *religious*, cerita sastra, kaum bijaksana dan sekumpulan orang yang berada dalam sejarah. Tidak ada manusia yang sempurna dengan memiliki semua kebaikan dan pastinya setiap orang memiliki beberapa kelemahan (Lickona, 2016).

Tujuan pendidikan karakter di sekolah antara lain (1) menguatkan dan mengembangkan nilai kehidupan sehingga menjadi kepribadian yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan, (2) dapat mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah, (3) membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan masyarakat untuk membentuk tanggung jawab pendidikan secara bersama (Kesuma, 2018).



Gambar 2.1 Diagram Komponen Karakter yang Baik (Lickona, 2016)

Anak panah pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa masing-masing domain karakter saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara domain satu dengan domain lainnya.

Salah satu fungsi pendidikan adalah untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan landasan yang paling mendasar dalam pendidikan yang dilandasi oleh kemampuan, watak, atau karakter warga negaranya. Melalui proses pendidikan atau pembelajaran maka dapat dibangun kepribadian peserta didik yang berkarakter. Manfaat pendidikan dalam perubahan sosial budaya yaitu peserta didik memiliki pengetahuan, berkompeten, dan memiliki keterampilan atau *skills* yang mengandung nilai-nilai karakter mulia dan cerdas. Sigmund Frued menyatakan “*character is a striving sistem wich underly behavior*”. Karakter merupakan kumpulan nilai yang terwujud dalam sistem daya yang memberikan landasan pada pemikiran, sikap dan perilaku (Sagala, 2013).

7. *Self management*

a. Definisi

Self management pada terminologi pendidikan merupakan metode, keterampilan dan strategi yang dapat dilakukan oleh seorang individu untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Mahoney dan Thoresen dalam Ghufro dan Risnawati (2010) mengatakan bahwa *self management* atau pengelolaan diri merupakan sebuah keadaan yang mempengaruhi tingkah laku individu, di mana tingkah laku tersebut diatur oleh kesadaran dan keterampilan. Komponen dasar pada *self management* adalah perilaku sasaran, memonitor perilaku tersebut, memilih prosedur yang diterapkan, melaksanakan dan mengevaluasi prosedur tersebut (Komalasari, 2011).

Prijosaksono dan Sembel (2002), menyatakan bahwa manajemen diri merupakan kemampuan seorang individu untuk mengenali dan mengelola dirinya (fisik, emosi, pikiran, jiwa dan spiritual) agar individu tersebut mampu melakukan pengelolaan

terhadap orang lain dengan berbagai sumber daya untuk mengendalikan ataupun menciptakan realitas kehidupan sesuai dengan harapan hidupnya.

b. Komponen manajemen diri

Menurut Prijosaksono dan Sembel (2002) manajemen diri bukanlah suatu tujuan, melainkan alat atau cara untuk mencapai tujuan atau misi hidup seseorang. Beberapa komponen dalam manajemen diri, meliputi: (a) mengenali dan menentukan potensi terbaik kita (*finding the best in you*), (b) bagaimana cara individu tersebut untuk dapat senantiasa tumbuh dan berkembang (*lifetime improvements*), (c) bagaimana cara individu tersebut agar dapat mengembangkan jejaring kehidupan sosial (*networking*).

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan diri

Menurut Zimmerman dan Pons (1990) dalam Ghufro dan Risnawati (2010) mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengelolaan diri, yaitu:

1) Individu sendiri (diri sendiri)

Faktor individu meliputi:

- a) Pengetahuan individu: semakin banyak dan beragam pengetahuan yang dimiliki individu akan semakin membantu individu dalam melakukan pengelolaan.
- b) Tingkat kemampuan meta kognisi (kesadaran tentang proses kognitif) yang dimiliki individu yang semakin tinggi akan membantu pelaksanaan pengelolaan diri dalam individu.
- c) Tujuan yang ingin dicapai: semakin banyak dan kompleks tujuan yang ingin diraih, maka semakin besar pula kemungkinan individu melakukan pengelolaan diri.

2) Perilaku

Bandura (1986) mengatakan bahwa dalam perilaku, terdapat tiga tahap yang berkaitan dengan pengelolaan diri, diantaranya adalah:

- a) *Self observation*: tahap individu melihat ke dalam dirinya dan perilakunya (performasinya).
- b) *Self judgment*: tahap individu membandingkan performansi dan standar yang telah dilakukannya dengan standar atau tujuan yang sudah dibuat atau ditetapkan oleh individu tersebut, cara ini dilakukan melalui upaya membandingkan performansi dengan standar atau tujuan yang telah dibuat atau ditetapkan. Individu dapat melakukan evaluasi atas performa yang telah dilakukannya dengan mengetahui letak kelemahan atau kekurangan performasinya.
- c) *Self reaction*: tahap yang mencakup proses individu dalam menyesuaikan diri dan rencana untuk mencapai tujuan atau standar yang telah dibuat dan ditetapkan.

3) Lingkungan

Teori sosial kognitif mencurahkan perhatian khusus pada pengaruh sosial dan pengalaman. Hal ini bergantung pada bagaimana lingkungan tersebut mendukung atau tidak mendukung.

8. Promosi kesehatan

a. Definisi

Lawrence Green (1984) memberikan definisi tentang promosi kesehatan, yaitu semua bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang berhubungan dengan ekonomi, politik, organisasi yang memiliki tujuan untuk mengubah perilaku dan lingkungan bagi Kesehatan yang dipersiapkan, piagam Ottawa (Ottawa Charter: 1986). Berdasarkan hasil rumusan konferensi internasional promosi kesehatan di Ottawa, Canada berpendapat bahwa promosi kesehatan

merupakan suatu proses yang bertujuan agar masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Masalah kesehatan masyarakat dapat ditentukan oleh dua faktor utama yaitu perilaku dan non perilaku (fisik).

Upaya promosi kesehatan yang berhubungan dengan fisik dapat di atasi dengan cara penyediaan sarana air bersih, dan pemberantasan penyakit menular. Sedangkan untuk upaya intervensi terhadap faktor perilaku dapat dilakukan dengan dua pendekatan (1) pendidikan (*education*). Pendidikan kesehatan ini bertumpu pada pengetahuan dan kesadaran melalui proses pembelajaran, (2) paksaan atau tekanan (*coercion*). Tindakan paksaan ini dipandang lebih cepat efeknya untuk merubah perilaku namun tidak akan bertahan lama (Notoatmodjo, 2010).

b. Ruang lingkup promosi kesehatan

- 1) Pendidikan kesehatan menekankan pada perubahan perilaku,
- 2) Pemasaran sosial menekankan pada produk atau jasa kesehatan,
- 3) Penyuluhan kesehatan menekankan pada penyebaran informasi kesehatan,
- 4) Upaya peningkatan *promotive* menekankan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan,
- 5) Upaya *advocacy* kesehatan untuk mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan,
- 6) Pengorganisasian masyarakat.

Adapun ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan lima pencegahan menurut Leavel & Clark, yaitu:

- 1) Promosi kesehatan
- 2) Perlindungan khusus
- 3) Diagnosa dini dan pengobatan segera
- 4) Pembatasan ke catatan
- 5) Rehabilitasi (Sulaeman, 2016c).

- c. Promosi kesehatan sebagai pendekatan terhadap faktor perilaku kesehatan

Menurut Lawrence Green 1980 dalam Notoatmodjo (2010), perilaku ini ditentukan oleh 3 faktor utama, yakni:

1) Faktor predisposisi (*predisposing factors*)

Merupakan faktor yang dapat mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku pada diri seseorang atau masyarakat. Kepercayaan, tradisi, sistem, nilai di masyarakat dapat mempermudah atau mempersulit terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat.

2) Faktor pemungkin (*enabling factor*)

Adalah sarana, fasilitas atau prasarana yang mendukung atau yang memfasilitasi terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat.

3) Faktor penguat (*reinforcing factors*)

Faktor penguat perilaku seseorang atau masyarakat dapat terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, peraturan, undang-undang, surat-surat keputusan dari para pejabat pemerintahan pusat atau daerah.

- d. Promosi kesehatan pada kesehatan reproduksi

Promosi kesehatan reproduksi dimulai sejak masa pra konsepsi dan kehamilan dini. Tahap ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memberikan kondisi yang terbaik untuk bayi dan ibunya. Point terpenting dalam promosi kesehatan adalah proses perubahan perilaku di mana hal ini merupakan kondisi penting dalam keberhasilan promosi kesehatan. Model perilaku dalam proses promosi kesehatan pada kesehatan reproduksi berdasarkan Teori *protection motivation* ialah bahwa seseorang harus memiliki motivasi untuk melindungi dirinya sendiri dari bahaya fisik, sosial dan psikologis (Rogers 1975, 1983). Terdapat empat proses yang mengikuti perubahan sikap dan perilaku yang

diantaranya ialah, (1) persepsi terhadap besarnya masalah/bahaya, (2) persepsi bahwa bahaya tersebut kemungkinan akan timbul (risiko), (3) persepsi tentang efektifitas alternatif tindakan yang dipromosikan agar terhindar dari risiko, (4) persepsi individu terhadap kemampuannya untuk melaksanakan tindakan (Emilia, 2008).

9. Model dan teori perilaku kesehatan

Perubahan perilaku kesehatan baik secara individu, kelompok maupun masyarakat dapat terjadi melalui proses pembelajaran. Proses perubahan perilaku didasari oleh perilaku kesehatan terlebih dahulu. Pada proses belajar terdapat unsur pokok yang saling berkaitan, antara lain masukan (*input*), proses (*process*), dan keluaran (*output*), dampak (*impact*) dan lingkungan (*environment*). Seseorang dapat merubah perilakunya bila memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap berlangsungnya perubahan perilaku.

a. Pengertian model dan teori

Teori adalah seperangkat ide atau gagasan yang diformulasikan berdasarkan alasan-alasan dari fakta-fakta yang ada untuk menjelaskan sesuatu. Teori sering diidentifikasikan secara tentatif spekulatif sebagai ide-ide yang bersifat alamiah. Kerlinger 1978 (Sulaeman, 2016b), mengatakan bahwa “*Theory is a set of interrelated construct (concept), definitions, and propotion that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with purpose of explaining and predicting the phenomena*” (teori merupakan seperangkat pengertian/konsep, definisi, dan proporsi yang digunakan untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena).

Menurut Little John terdapat empat dimensi teori: (1) asumsi filosofi atau kepercayaan dasar yang mendasari teori, (2) konsep atau

susunan-susunan pembentukan, (3) penjelasan atau hubungan dinamis yang dihasilkan teori, sebagai panduan untuk melakukan tindakan. Peran teori adalah: (1) membantu mensistematisasikan dan menyusun data dalam pertalian logis, (2) memberikan skema tentang medan yang semula belum dipetakan, serta (3) memberikan arahan untuk penelitian lebih lanjut Herman (2007) dalam (Sulaeman, 2016b).

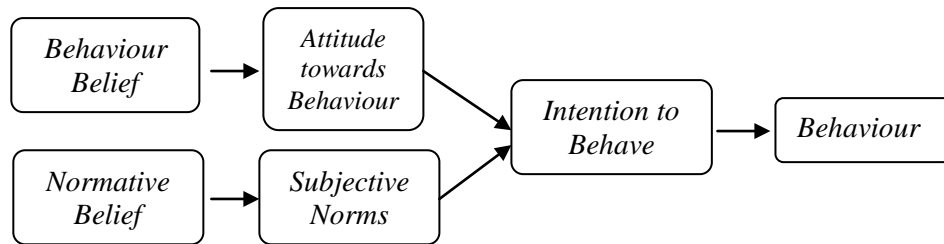
Definisi model menurut McLeod (2001) adalah penyederhanaan dari sesuatu yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas (keseluruhan). Menurut Egger *et al.*, (2005) model menggambarkan sejumlah teori untuk membantu memahami masalah spesifik yang sesuai dengan fakta atau konteks. Dengan demikian model adalah konstruksi kerangka teoritis yang membentuk diagram dan atau persamaan-persamaan matematika tertentu. Pada sebuah konstruksi kerangka pemikiran, jumlah variabel yang diteliti, prediksi tentang pola hubungan antar variabel, dekomposisi pengaruh antar variabel, dan jumlah parameter yang diestimasi ditampilkan sebagai suatu model (Sulaeman, 2016b).

Perbedaan model dan teori menurut Brodbeck (1959), mengatakan bahwa teori kesahihannya telah dibuktikan melalui pengujian empiris dan berfungsi untuk menjelaskan fenomena sosial, sedangkan model didasarkan pada *isomorphism* atau kesamaan antara kenyataan yang satu dengan kenyataan lainnya antara dua atau lebih. Teori berfungsi untuk menemukan dan mengusulkan hubungan antara konsep yang digunakan untuk mengamati gejala sosial. Sementara itu, untuk memudahkan pemahaman kompleksitas dan kerumitan teori, salah satu cara yang dapat digunakan ialah dengan pemodelan. Dengan pemodelan, kita mampu menafsirkan secara abstrak ciri penting sebuah teori, unsur, dan sifat hingga dapat diadaptasi dengan fenomena ataupun realita (Sulaeman, 2016b).

b. Teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*)

Pengertian *Theory of Reasoned Action* (TRA) adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan perilaku kesehatan tergantung dari niat yang dimiliki oleh orang tersebut. Niat melakukan atau tidak melakukan terhadap perilaku kesehatan dapat dipengaruhi oleh dua penentu/determinan dasar, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude to words behavior*) dan norma subjektif terhadap niat untuk melakukan atau tidaknya suatu perilaku, Ajzen melengkapi TRA dengan keyakinan (*beliefs*). Ajzen mengemukakan bahwa sikap muncul dari keyakinan terhadap perilaku (*behavior beliefs*). Norma subjektif berasal dari keyakinan *normative* (*normative beliefs*) Ajzen (2005) dalam (Sulaeman, 2016b).

Kerangka konsep TRA menurut Fishbein dan Ajzen terdiri dari (1) keyakinan perilaku dan sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs and attitude to word behavior*). Keyakinan perilaku adalah keyakinan individu tentang konsekuensi dari perilaku tertentu. Konsep ini didasarkan pada kemungkinan subjektif bahwa perilaku akan menghasilkan hasil akhir (*outcome*) yang diperoleh. Sedangkan sikap terhadap perilaku (*attitude to word behavior*) adalah evaluasi positif atau negatif individu dari kinerja perilaku tertentu, (2) keyakinan normatif dan norma subjektif (*normative beliefs and subjective norm*) adalah persepsi individu dari tekanan sosial normatif, atau keyakinan orang lain yang relevan bahwa ia harus atau tidak harus melakukan perilaku. Sedangkan norma subjektif adalah persepsi individu terkait perilaku tertentu, di mana penilaian orang lain ikut mempengaruhi secara signifikan (Amjad *et al.*, 2009), (3) niat perilaku dan perilaku (*behavior intention and behavior*) adalah indikasi bahwa individu tersebut siap untuk melakukan perilaku tertentu. Diasumsikan menjadi *anteseden* (pendahulu) langsung dari perilaku Ajzen (2002) dalam (Sulaeman, 2016b).



Gambar 2.2 Kerangka Teori Tindakan Beralasan
Theory of Reasoned Action (TRA) (Sulaeman, 2016b)

Komponen-komponen teori tindakan beralasan adalah (1) *behaviour belief*, seseorang akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari perilaku tersebut serta konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi jika individu melakukan perilaku tersebut, (2) *normative belief*, merupakan dampak dari norma-norma subjektif dan norma sosial yang mengacu pada keyakinan seseorang terhadap keyakinan dan motivasi seseorang untuk melakukan perilaku tersebut, (3) *attitude towards the behaviour*, sikap adalah fungsi dari kepercayaan tentang konsekuensi perilaku atau keyakinan *normative*, persepsi terhadap konsekuensi suatu perilaku dan penilaian terhadap perilaku tersebut, (4) *importance norms*, norma-norma penting atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, adalah pengaruh faktor sosial yang berlaku di budaya masyarakat di mana seseorang itu tinggal, (5) *subjective norms*, dorongan anggota keluarga, termasuk kawan terdekat juga mempengaruhi agar seseorang dapat menerima perilaku tertentu, (6) *behavioral intention*, niat ditentukan oleh sikap, norma dalam masyarakat dan norma subjektif serta komponen pertama yang mengacu pada sikap perilaku, (7) *behaviour*, sebuah tindakan yang telah dipilih seseorang untuk ditampilkan berdasarkan atas niat yang sudah terbentuk (Priyoto, 2014).

10. Motivasi perilaku

a. Pengertian

Menurut Samsudin (2010) motivasi adalah proses mempengaruhi atau dorongan dari luar terhadap seseorang atau

kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Edwin B. Flippo dalam Hasibuan (2010), bahwa motivasi merupakan suatu keahlian untuk mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja dengan lebih baik, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi bisa tercapai sekaligus.

b. Hubungan motivasi dengan perilaku

Motivasi merupakan suatu tenaga yang ada dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah laku. Perilaku ini timbul karena faktor internal dan eksternal. Perilaku dipandang sebagai reaksi atau respon terhadap suatu stimulus.

Woodworth dalam Petri (2013) mengungkapkan bahwa perilaku bisa muncul karena adanya motivasi atau dorongan (*drive*) sehingga individu yang bersangkutan diarahkan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai. Karena tanpa dorongan tidak akan ada suatu kekuatan yang mengarahkan individu pada suatu mekanisme timbulnya perilaku. Dorongan diaktifkan oleh adanya kebutuhan (*need*), dalam arti kebutuhan membangkitkan dorongan dan dorongan ini pada akhirnya mengaktifkan atau memunculkan mekanisme perilaku.

Motivasi sebagai penyebab dari timbulnya perilaku menurut konsep Woodworth mempunyai 3 karakteristik yaitu: (1) intensitas, menyangkut lemah dan kuatnya dorongan sehingga menyebabkan individu berperilaku tertentu, (2) pemberi arah, mengarahkan individu dalam menghindari atau melakukan suatu perilaku tertentu, (3) persistensi atau kecenderungan untuk mengulang perilaku secara terus menerus.

Pandangan lain dikemukakan oleh Hull dalam As'ad (2012) yang menegaskan bahwa motivasi dan dorongan dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk memenuhi atau memuaskan

kebutuhan yang ada pada diri individu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perilaku muncul tidak semata-mata karena dorongan yang bermula dari kebutuhan individu saja, tetapi juga karena adanya faktor belajar. Faktor dorongan ini dikonsepsikan sebagai kumpulan energi yang dapat mengaktifkan tingkah laku atau sebagai motivational faktor, di mana timbulnya perilaku menurut Hull adalah fungsi dari tiga hal yaitu: kekuatan dari dorongan yang ada pada individu, kebiasaan yang didapat dari hasil belajar, serta interaksi antara keduanya.

11. Remaja

Remaja dalam bahasa lainnya adalah *adolescence*, dan berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang mempunyai arti tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Menurut *World Health Organization* (WHO) remaja mempunyai periode usia 10-19 tahun, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutnya sebagai kaum muda (*youth*) untuk individu yang berusia 15-24 tahun. Sedangkan menurut *Health Resources and Services Administrations Guidelines* Amerika Serikat, usia remaja terdiri dari 11-21 tahun, serta terbagi menjadi tiga: (1) remaja awal; 11-14 tahun (2) remaja tengah; 15-17 tahun dan remaja akhir; 18-21 tahun. Sedangkan definisi remaja menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun.

Gunarsa (1978), dalam Kusmiran, (2013) menyatakan bahwa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang sudah mengalami semua perkembangan untuk mempersiapkan diri memasuki masa dewasa. Usia remaja mempunyai masa transisi antara lain meliputi:

- a. Transisi fisik berkaitan dengan perubahan bentuk tubuh di mana fisik seorang remaja berbeda dengan anak-anak, namun belum sepenuhnya membentuk tubuh orang dewasa. Pada tahap inilah seorang individu masih merasa kebingungan terkait perannya di

tengah masyarakat. Disamping itu, hal tersebut juga didukung oleh sikap masyarakat yang kurang konsisten.

- b. Transisi dalam kehidupan emosi: perubahan hormonal yang terjadi pada masa ini menyebabkan peningkatan emosi. Oleh karena itu, remaja sering nampak gelisah, cepat tersinggung, sering melamun dan sedih. Namun secara tiba-tiba mereka dapat tertawa gembira ataupun marah-marah.
- c. Transisi dalam kehidupan sosial: lingkungan keluarga merupakan lingkungan sosial bagi seorang anak yang sudah mulai tergeser. Pada tahap ini, lingkungan seorang anak sudah bergeser pada lingkungan teman sebaya. Ikatan pada teman sebaya merupakan cara melepaskan diri dari ikatan lingkungan keluarga.
- d. Transisi dalam nilai-nilai moral: remaja mulai meninggalkan nilai-nilai yang dianutnya, meragukan nilai-nilai yang diterima waktu kecil dan mulai mencari nilai sendiri.
- e. Transisi dalam pemahaman: remaja mempunyai perkembangan kognitif yang pesat untuk memiliki kemampuan berfikir abstrak.

12. Kesehatan reproduksi

a. Definisi

Konferensi internasional kependudukan dan pembangunan (*International Conference on Population and Development/ICPD*) serta konferensi wanita sedunia di Beijing pada tahun 1995 menyepakati tentang definisi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh (tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan) dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. *International Conference on Population and Development (ICPD)* di Kairo 1994, hak-hak reproduksi mencakup:

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi.

- 2) Hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi.
- 3) Hak atas kebebasan berfikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi.
- 4) Hak untuk memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran.
- 5) Hak untuk hidup dan bebas dari risiko kematian karena kehamilan atau masalah gender.
- 6) Hak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.
- 7) Hak untuk bebas dari segala bentuk penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi.
- 8) Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan reproduksinya
- 9) Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.
- 10) Hak dalam kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik bernuansa kesehatan reproduksi.
- 11) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kesehatan reproduksi.

Indikator terpenuhinya hak reproduksi dapat digambarkan dalam derajat kesehatan reproduksi masyarakat: (1) menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), (2) menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), (3) meningkatnya cakupan Keluarga Berencana (KB) dan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana, (4) menurunnya jumlah ibu hamil dengan 4 terlalu, (5) menurunnya jumlah perempuan dan atau ibu hamil dengan masalah kesehatan, (6) meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap penularan penyakit menular, (7) meningkatnya pemahaman laki-laki terhadap upaya pencegahan penyakit menular seksual (Kumalasari dan Andyantoro, 2013).

Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) secara umum diartikan sebagai kondisi sehat dari sistem, fungsi dan proses alat reproduksi yang dimiliki seorang laki-laki dan perempuan berusia 10-14 tahun

BKKBN-UNICEF, (2004) dalam (Kumalasari dan Andhyantoro, 2013).

b. Perubahan fisik pada masa remaja, menurut Kusmiran (2014):

1) Tanda-tanda seks primer

Kematangan fungsi organ reproduksi pada laki-laki ditandai adanya mimpi basah, artinya mereka bermimpi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual, sehingga mengeluarkan sperma. Sedangkan tanda kematangan organ reproduksi perempuan ditandai dengan datangnya *menarche* (haid pertama). *Menarche* ini merupakan permulaan atau awal dari serangkaian pengeluaran darah, lendir dan jaringan sel yang hancur dari uterus secara berkala dengan siklusnya secara normal 28 hari. Haid ini akan terus berlangsung sampai masa *menopause* datang.

2) Tanda seks sekunder

Pada laki-laki mulai tumbuh rambut, terutama pada kemaluan, kemudian testis dan penis mulai membesar. Setelah itu muncul rambut pada ketiak dan rambut pada wajah. Kulit, kulit remaja laki-laki akan menjadi lebih kasar, tidak jernih dan pori-pori semakin membesar. Kelenjar lemak dan kelenjar keringat, karena produksi minyak meningkat maka akan mudah berkeringat terutama di bagian ketiak. Otot, otot remaja laki-laki makin bertambah besar dan kuat dan jika melakukan latihan beban maka akan membentuk otot pada lengan, bahu dan tungkai kaki. Suara, suara terjadi perubahan yang mula-mula agak serak kemudian volumenya semakin meningkat. Benjolan pada dada, pada usia remaja akan muncul benjolan-benjolan kecil di sekitar kelenjar susu. Namun setelah beberapa minggu membesar, kemudian menurun.

Pada wanita: rambut, rambut mulai tumbuh pada kemaluan setelah pinggul dan payudara mulai berkembang.

Setelah mendapatkan haid akan nampak bulu yang ada di wajah dan ketiak. Semua rambut yang tumbuh selain pada wajah semakin hari akan semakin subur, lebih kasar, lebih gelap dan agak keriting. Pinggul, pinggul remaja wanita semakin berkembang dan membesar serta membulat. Payudara, bersamaan dengan pinggul yang membesar, maka payudara juga mengalami pembesaran dan puting susu juga menonjol. Kulit, kulit berubah menjadi lebih tebal, pori-pori membesar tetapi tetap lembut. Kelenjar keringat, kelenjar tersebut menjadi semakin aktif. Sumbatan dapat menyebabkan jerawat. Keringat baunya sangat menusuk pada saat sebelum dan selama haid. Otot, otot semakin membesar dan kuat. Membentuk bahu, lengan dan tungkai kaki. Suara, suara semakin merdu.

c. Aspek perkembangan pada remaja

1) Perkembangan sosial

Perubahan dalam perilaku sosial ditunjukkan dengan:

- a) Minat dalam hubungan heteroseksual yang lebih besar,
- b) Kegiatan-kegiatan sosial melibatkan dua jenis kelamin,
- c) Bertambahnya wawasan sehingga remaja memiliki penilaian yang lebih baik serta bisa mengerti orang lain. Remaja juga mengembangkan kemampuan sosial yang mendorongnya lebih percaya diri dan aktif dalam aktivitas sosial,
- d) Berkurangnya prasangka dan diskriminasi.

2) Perkembangan emosi

Ciri-ciri perkembangan emosi pada tahap ini antara lain:

- a) Emosi lebih mudah bergejolak.
- b) Kondisi emosional berlangsung cukup lama sampai pada akhir keadaan semula.
- c) Jenis-jenis emosi sudah mulai bervariasi, remaja juga sering merasa bingung dengan emosinya sendiri karena muncul

emosi-emosi yang bertentangan dalam suatu waktu misalnya sayang dan benci.

- d) Mulai munculnya ketertarikan lawan jenis.
- e) Mudah tersinggung dan merasa malu.

3) Perkembangan kognitif

Perkembangan kognitif pada remaja umumnya menampilkan tingkah laku:

- a) Kritis
- b) Rasa ingin tahu yang kuat
- c) Jalan pikiran egosentris
- d) Merasa selalu diperhatikan
- e) Merasa dirinya sangat unik dan berbeda dengan orang lain.

4) Perkembangan moral

Perubahan paling mendasar pada moralitas remaja, diantaranya:

- a) Pada masa remaja mereka mulai memberontak dari nilai-nilai yang ditentukan oleh orang tua dan orang dewasa lainnya serta mulai menentukan nilainya sendiri.
- b) Pandangan moral remaja semakin lama semakin menjadi abstrak dan kurang nyata.
- c) Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan bukan pada apa yang salah.
- d) Penilaian moral menjadi semakin kritis sehingga remaja lebih berani menganalisis norma sosial dan norma pribadi serta berani mengambil keputusan berbagai masalah moral yang dihadapinya.
- e) Penilaian moral menjadi kurang egosentris tetapi lebih mengembangkan norma berdasarkan nilai-nilai kelompok sosial.
- f) Penilaian moral cenderung melibatkan beban emosi dan menimbulkan ketegangan psikososial.

5) Perkembangan konsep diri

Perkembangan konsep diri pada remaja adalah :

- a) Perubahan fisik yang cukup drastis pada masa remaja.
- b) Sangat terpengaruh oleh pandangan orang lain terhadap dirinya.
- c) Memiliki aspirasi yang sangat tinggi tentang segala hal.
- d) Memandang dirinya lebih rendah atau lebih tinggi dari pada kondisi objektifnya.
- e) Merasa selalu ingin diperhatikan atau menjadi pusat perhatian.

6) Perkembangan heteroseksual

Perkembangan heteroseksual pada remaja meliputi:

- a) Perilaku orang dewasa dipelajari oleh remaja sesuai dengan jenis kelaminnya untuk menarik perhatian lawan jenisnya.
- b) Memiliki minat yang semakin kuat terhadap lawan jenis dan disertai keinginan kuat untuk memperoleh dukungan dari lawan jenis.
- c) Minat terhadap kehidupan seksual.
- d) Rasa ingin tahu terhadap informasi tentang kehidupan seksual orang dewasa bahkan muncul keinginan bereksplorasi untuk melakukannya.
- e) Memiliki kehendak dalam keintiman secara fisik (Kusmiran, 2014).

d. Karakteristik tahap perkembangan pada remaja

- 1) Masa remaja awal (11-14 tahun): pada masa ini, hal-hal baru mulai dicoba oleh remaja untuk menguji kemandirian dan kepercayaan diri sehingga dukungan dan bimbingan kuat dari keluarga sangat dibutuhkan. Individu pada awal biasanya sangat bersemangat dan antusias.
- 2) Masa remaja pertengahan (15-17 tahun): masa ini ditandai dengan adanya introspeksi dan fluktuasi dalam kepercayaan diri.

Hal yang mereka cari ialah berupa keseimbangan, maturitas yang sering kali mengakibatkan remaja menarik diri. Mereka mulai percaya bahwa semua saran yang diberikan oleh asuhan keluarga merupakan upaya untuk mengendalikan mereka sepenuhnya dan remaja dapat mencari bimbingan di luar rumah.

- 3) Masa remaja akhir (18-20 tahun): pada masa akhir ini, remaja mulai dihadapkan dengan isu maturasi setiap hari. Mereka menjauh dari individu, tempat, dan segala yang familier bagi mereka. Untuk menghadapi dunia tersebut, yang perlu dilakukan ialah peningkatan maturitas dan peningkatan keterampilan sosial dan professional. Selama masa ini, pernyataan dan isu moral yang melibatkan pembuatan keputusan etik mulai terkait. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran dapat menimbulkan refleksi dan reevaluasi internal. Perbedaan pandangan terhadap individu dan cara berfikir dapat mengakibatkan kawula muda mempertanyakan nilai dan gagasan sebelumnya diterima (Kowalski, 2014).

e. Kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi,

Menurut Widyastuti *et al.*, (2014) kesehatan remaja secara umum mempengaruhi kesehatan reproduksi tersebut. Beberapa keadaan memberikan pengaruh buruk pada kesehatan reproduksi remaja adalah:

- 1) Mal nutrisi atau kurang gizi

Mal nutrisi atau gizi kurang: anemia sangat berpengaruh pada kesehatan reproduksi, terutama pada wanita. Anemia sangat berbahaya pada saat melahirkan dan proses persalinan, bahkan dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya.

- 2) Kekurangan zat gizi lain: misalnya kekurangan vitamin, mineral, atau protein serta zat lainnya dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit dan berujung pada gangguan kesehatan reproduksi. *commit to user*

- 3) Pertumbuhan lambat pada pinggul, dapat menyebabkan terjadinya panggul sempit dan akan mengakibatkan penyulit pada persalinan.
 - 4) Penyakit lain yang dapat mempengaruhi kesehatan remaja, baik karena infeksi maupun karena keturunan sehingga dapat berpengaruh juga pada kesehatan reproduksinya.
 - 5) Stres atau depresi, stress yang berat dan berlarut-larut dapat menyebabkan imunitasnya menurun. Dan akan mudah terserang penyakit.
- f. Kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi kaitannya dengan lingkungan.
- 1) Masalah pendidikan: berpendidikan rendah atau buta huruf, dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan, wawasan, kepandaian, dan persepsi tentang masalah kesehatan reproduksi. sebagai akibatnya dapat menyebabkan perilaku seks yang menyimpang.
 - 2) Masalah lingkungan dan pekerjaan: lingkungan dan suasana kerja yang kurang sehat dapat menyebabkan kesehatan remaja terganggu. Lingkungan sosial yang kurang sehat, juga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan fisik, mental dan emosional remaja.
- g. Masalah seks dan seksualitas
- 1) Pengetahuan yang kurang lengkap dapat mengakibatkan masalah tentang kesehatan seksual
 - 2) Kurangnya bimbingan untuk bersikap positif dalam hal yang berkaitan dengan seksualitas
 - 3) Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba
 - 4) Penyalahgunaan seksual
 - 5) Kehamilan remaja
 - 6) Kehamilan pranikah/kehamilan yang tidak diinginkan.

h. Pembekalan pengetahuan yang diperlukan remaja

- 1) Perkembangan fisik, kejiwaan dan kematangan seksual remaja.
- 2) Optimalisasi pengetahuan tentang seksualitas secara lebih luas dan tidak menganggap tabu. Dengan pendidikan seksual yang benar, maka akan dapat memberikan wawasan bahwa seks adalah hal yang normal terjadi pada semua orang, selain itu remaja juga dapat mengetahui tentang berbagai perilaku seksual yang berisiko sehingga dapat menghindarinya.
- 3) Proses reproduksi yang bertanggung jawab.
- 4) Sikap pengendalian diri terhadap naluri seksualitas dan menyalurkannya dalam hal atau kegiatan yang positif serta Penyaluran hubungan seksual dilakukan setelah berkeluarga, untuk melanjutkan keturunan sangat penting untuk dimiliki oleh remaja.
- 5) Pergaulan sehat antara laki-laki dan perempuan.
- 6) Informasi mengenai bagaimana berperilaku reproduksi sehat dalam bergaul dengan lawan jenisnya sangat diperlukan oleh para remaja. Serta cara untuk menghadapi godaan negatif, misalnya penggunaan napza dan seks pra nikah.

i. Persiapan pra nikah

Informasi mengenai persiapan calon pengantin secara mental dan emosional dalam memasuki kehidupan berkeluarga.

j. Kehamilan, persalinan usia remaja, dan cara pencegahannya

Informasi terkait pencegahan kehamilan dan persalinan di usia remaja sangat diperlukan oleh remaja sehingga mereka lebih mempersiapkan diri dalam memasuki kehidupan berkeluarga di masa depan (Widyastuti *et al.*, 2014).

13. Pernikahan dini

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Pengertian perkawinan di bawah umur adalah perkawinan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seseorang (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia dan juga telah ditetapkan oleh pemerintah instrument hak asasi manusia dengan tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan.

Konvensi hak anak (*convention on the rights of the child* 1990 yang telah diratifikasi melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Setiap negara peserta konvensi wajib untuk melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Judiasih *et al.*, 2018).

Kebanyakan orang tua menginginkan anaknya menikah di usia dini dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi, namun hasilnya justru sebaliknya. Seringkali perkawinan usia dini berujung pada perceraian yang akhirnya si anak dan cucu kembali menjadi beban orang tua yang mengakibatkan kemiskinan yang dialami keluarga tersebut. Perkawinan usia dini di Indonesia dalam praktiknya tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat. Permasalahan tentang usia perkawinan sampai saat ini selalu menimbulkan berbagai pendapat dan juga berbagai penafsiran, permasalahan yang sering terjadi khususnya bagi wanita yang menikah di usia dini yang mana dapat menimbulkan risiko, antara lain:

- a. Potensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil dan melahirkan anak yang prematur karena belum matangnya pertumbuhan fisik.

- b. Cenderung melahirkan anak yang kurang gizi, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, atau bayi lahir cacat.
- c. Ibu berisiko anemia (kurang darah), terjadi eklampsia (kejang pada perempuan hamil), dan mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan.
- d. Meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu atau meningkatnya angka kematian ibu karena perkembangan sosial belum stabil.
- e. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker *serviks*.
- f. Terjadinya trauma dan kerentanan dalam perkawinan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga bahkan terjadi perceraian akibat usia anak yang belum siap secara psikologis, ekonomis, sosial, intelektual dan spiritual.
- g. Studi epidemiologi kanker *serviks* menunjukkan risiko meningkat bila berhubungan seks pertama kali di bawah usia 15 tahun dan risiko terkena penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS (Judiasih *et al.*, 2018).

Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini ialah antara lain (1) optimalisasi undang-undang pernikahan, (2) edukasi seks pada remaja, (3) peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pendewasaan usia pernikahan pada orang tua dan masyarakat, (4) bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, (5) model desa percontohan pendewasaan usia pernikahan (Kumalasari & Andhyantoro, 2013).

Risiko kesehatan yang dapat muncul pada seorang perempuan yang melahirkan di usia dini adalah risiko terjadinya kanker. Penelitian yang dilakukan *keck school of medicine, University of Southern California* (USC) mengindikasikan bahwa perempuan melahirkan di bawah usia 25 tahun memiliki risiko besar mengidap kanker *endometrium*. Tetapi sebaliknya, perempuan yang melahirkan di atas usia 40 atau lebih mengalami penurunan risiko kanker *endometrium* sebesar 44 persen.

Kanker *endometrium* adalah kanker yang menyerang endometrium atau jaringan yang melapisi rahim, dan merupakan kanker *ginekologi* yang paling umum di Amerika Serikat.

Pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa untuk mengurangi risiko kanker *endometrium* bisa diusahakan dengan syarat bahwa usia ibu melahirkan harus sudah matang (sudah cukup umur). Selain menimbulkan risiko terjadinya kanker, perempuan yang belum cukup umur atau kehamilan pada remaja mempunyai risiko empat kali lipat mengalami luka yang serius dan meninggal saat melahirkan (Rohan & Siyoto, 2013).

14. Keluarga

a. Pengertian

Friedman (1998), dalam Suprajitno (2004) mendefinisikan keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dan memiliki keterikatan aturan dan emosional dan masing-masing individu mempunyai peran yang merupakan bagian dari keluarga. Pakar konseling keluarga Laela (2017), menulis bahwa keluarga adalah suatu ikatan/persekutuan hidup yang didasari dengan perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (Wirdhana, 2012).

b. Bentuk keluarga

Terdapat beberapa tipe atau bentuk keluarga yaitu (Fatimah, 2010):

- 1) Keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diperoleh dari keturunan atau adopsi maupun keduanya.

- 2) Keluarga besar (*extended family*), yaitu keluarga inti ditambah dengan sanak saudaranya, misalnya kakek, nenek, keponakan, paman, bibi, saudara sepupu, dan lain sebagainya.
 - 3) Keluarga bentukan kembali (*dyadic family*), yaitu keluarga baru yang terbentuk dari pasangan yang telah bercerai atau kehilangan pasangannya.
 - 4) Orang tua tunggal (*single parent family*), yaitu keluarga yang terdiri dari salah satu orang tua baik pria maupun wanita dengan anak-anaknya akibat perceraian atau ditinggal oleh pasangannya.
 - 5) Ibu dengan anak tanpa perkawinan (*the unmarried teenage mother*).
 - 6) Orang dewasa (laki-laki atau perempuan) yang tinggal sendiri tanpa pernah menikah (*the single adult living alone*).
 - 7) Keluarga dengan anak tanpa pernikahan sebelumnya (*the nonmarital heterosexual cohabiting family*) atau keluarga kabitas (*cohabitation*).
 - 8) Keluarga berkomposisi (*composite*) yaitu keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama-sama.
- c. Peran keluarga

Pola perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam situasi dan posisi tertentu digambarkan sebagai hasil dari peranan keluarga. Adapun macam peranan keluarga antara lain (Ali, 2009):

1) Peran ayah

Sebagai seorang suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, ayah berperan sebagai kepala keluarga, pendidik, pelindung, mencari nafkah, serta pemberi rasa aman bagi anak dan istrinya dan juga sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

2) Peran ibu

Sebagai seorang istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya, peran ibu sangat penting dalam keluarga. Selain sebagai seorang istri, peran ibu juga meliputi: sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung dari anak-anaknya saat ayahnya sedang tidak di rumah, mengurus rumah tangga, serta dapat juga berperan sebagai pencari nafkah. Selain itu ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

3) Peran anak

Peran anak yaitu melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

d. Fungsi keluarga

Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini dapat dicerminkan atau dilihat dari gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Selain itu, kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga dipengaruhi oleh fungsi keluarga (Families, 2010).

Terdapat 8 fungsi keluarga yaitu (Wirdhana, 2013):

1) Fungsi keagamaan

Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga dapat menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Fungsi sosial budaya

Fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3) Fungsi cinta dan kasih sayang

Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4) Fungsi perlindungan

Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.

5) Fungsi reproduksi

Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan manusia secara universal.

6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.

7) Fungsi ekonomi

Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

8) Fungsi pembinaan lingkungan

Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis. *commit to user*

15. Modal sosial dan *habitus*

a. Modal sosial

Networking dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang sangat menguntungkan, baik secara individu maupun kelompok. Dengan menjalin hubungan antar sesama dan terus berlangsung dan menjaganya dengan baik, maka orang mampu bekerja secara sama-sama. Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dan jejaring tersebut dapat menjadi sumber daya dan modal. Modal sosial merupakan jaringan sosial yang sangat bernilai.

Bourdieu dan Wacquant (1992) mengatakan bahwa modal sosial merupakan sumber daya yang aktual di mana tempat berkumpulnya seorang individu atau kelompok, karena mempunyai jaringan yang bertahan lama yaitu berupa hubungan timbal balik pengenalan dan pengakuan. Tidak berbeda jauh dari Putnam (1996) bahwa modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial-jaringan, norma dan kepercayaan di mana individu atau kelompok dimotivasi untuk lebih berpartisipasi serta bertindak secara bersamaan adalah hal yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama-sama (Field, 2018).

Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai “kumpulan sumber daya yang sesungguhnya atau calon sumber daya yang terkait yang memiliki sebuah jaringan yang tahan lama yang terdiri atas hubungan saling mengenal dan saling mengakui yang kurang lebih terlembaga”. Dalam *form of capital*, Pierre Bourdieu membedakan antara tiga bentuk modal: modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolis.

Modal ekonomi adalah kemampuan menguasai sumber daya ekonomi seperti uang tunai dan aset. Modal budaya adalah bentuk-bentuk pengetahuan, keterampilan, pendidikan dan kelebihan seseorang yang membuat individu tersebut memiliki status lebih

tinggi di masyarakat. Modal budaya menurut Bourdieu di bagi menjadi (1) keadaan berwujud, ini adalah modal budaya yang berwujud di dalam individu, sifat yang diwariskan kaitannya dengan waktu, budaya dan tradisi yang diwariskan dari keadaan yang berwujud kepada yang lain biasanya di dalam keluarga melalui sosialisasi, (2) keadaan yang diobyektifkan, instrument ilmiah atau karya seni adalah benda-benda budaya yang dapat disebarakan secara fisik yang dijual sebagai pengerahan modal ekonomi dan secara simbolis sebagai modal budaya, (3) keadaan yang terlembaga, ini adalah pengakuan modal budaya kelembagaan yang dimiliki seseorang, yang paling sering dipahami sebagai mandate atau kualifikasi akademik. Modal simbolis sangat dihormati dan bergengsi dan bagi Bourdieu modal sosial adalah merupakan salah satu jenis modal Warde, dkk (2002) dalam (Slamet, 2012).

1) Unsur dan komponen modal sosial

a) Kepercayaan (*trust*)

Kepercayaan adalah keyakinan akan reliabilitas seseorang atau sistem yang berhubungan dengan berbagai hasil dan peristiwa, di mana keyakinan tersebut mengekspresikan suatu iman (*faith*) terhadap integritas cinta kasih orang lain atau ketepatan prinsip secara abstrak (Damsar, 2009).

b) Nilai dan norma (*norms*)

Menurut Horton dan Hunt dalam Setiadi dan Kolip, (2011), nilai merupakan gagasan tentang bermakna tidaknya suatu pengalaman. Nilai merupakan bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah apabila harmonis dan selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat. Norma adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial secara kolektif atau bersama yang mengandung berbagai sangsi, baik sangsi moral maupun

sangsi fisik, bagi orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial.

c) Jaringan sosial (*networking*)

Jaringan merupakan ikatan simpul (orang atau kelompok) yang berhubungan dengan media hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan. Jaringan adalah hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau dikaitkan sebagai suatu ikatan (Damsar, 2009).

d) Saling menguntungkan (*reciprocal relationship*)

Mengembangkan relasi-relasi, sikap dan tindakan saling menguntungkan satu sama lain (*reciprocal relationship*) (Usman, 2018).

2) Peran modal sosial

- a) Relasi-relasi sosial memfasilitasi aliran informasi tentang berbagai macam kebutuhan lingkungan.
- b) Relasi-relasi sosial berkorelasi positif dengan pengaruh yang mampu menjadi kekuatan mobilisasi dukungan.
- c) Relasi-relasi sosial merupakan media untuk menanamkan *trust*, sehingga orang dapat mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan.
- d) Relasi-relasi sosial adalah media untuk mempertegas identitas sehingga orang mudah mengembangkan hubungan yang saling menghargai (*recognition*) (Usman, 2018).

3) Bentuk-bentuk modal sosial

- a) *Bonding social capital* merupakan konsepsi awal untuk menjalin relasi-relasi dalam suatu kelompok yang bersifat *homogeny* yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara bersama dan diperkuat oleh kesamaan identitas.

- b) *Bridging social capital* adalah banyaknya relasi yang dibangun untuk memberikan fasilitas kerjasama dalam rangka pengembangan akses pada macam-macam sumber daya.
- c) *Linking social capital* yaitu relasi-relasi dalam suatu jaringan yang dalam perkembangannya di dalamnya terdapat perbedaan kelompok pada kekuasaan politik, status sosial dan kekayaan ekonomi (*wealth*). *Linking* ini memfasilitasi akses terhadap sumber daya dalam lintas perbedaan strata, dan lebih kompleks daripada *bonding* maupun *bridging social capital* karena disana terdapat banyak relasi yang terjalin antara pelaku-pelaku dengan berbagai latar belakang politik, sosial, ekonomi dan kultural (Usman, 2018).

Beberapa pakar dalam modal sosial mengatakan bahwa modal sosial merupakan harta bersama sekaligus harta individual. Pada tingkat kelompok, modal sosial diposisikan sebagai sumber daya yang tumbuh dan berkembang dengan jejaring. Nan Lin berpendapat modal sosial adalah aset relasional. Tetapi *trust*, norma dan sanksi merupakan aset bersama, dan aspek tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari modal sosial. Walaupun dapat menciptakan relasi serta jejaring dalam mendayagunakan sumber daya.

Bourdieu dan Coleman mengatakan kedekatan hubungan memiliki pengaruh yang nyata dalam modal sosial karena hubungan tersebut dapat memelihara *trust*, norma, bahkan membuat kewenangan menjadi mapan. Sementara itu, fungsi dari modal sosial sendiri dapat memberikan keuntungan pada individu-individu serta memfasilitasi mereka untuk menempati posisi-posisi penting dalam kehidupannya.

Modal sosial dalam pendidikan dapat memberikan *output* berupa kualitas pendidikan. Hal tersebut mempunyai asumsi bahwa semakin baik sumber daya yang dimiliki sekolah, ataupun keluarga maka semakin baik juga sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan serta dapat meningkatkan kualitas layanan penyelenggara pendidikan sehingga memberikan kontribusi positif untuk prestasi belajar peserta didik. Loury (1981) dalam Usman (2018) menggunakan istilah modal sosial untuk dapat dijadikan suatu ikatan kuat dalam kehidupan keluarga, kelompok komunitas dan teraplikasikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

Coleman mengemukakan tentang studi motivasi di kalangan peserta didik, mengatakan bahwa hubungan yang akrab atau dekat yang terjalin dengan orangtuanya mempengaruhi dorongan prestasi akademik karena anak merasa dilindungi, dan tidak terjebak dalam kondisi atau keadaan-keadaan serta norma-norma yang melanggar atau menodai nilai-nilai sosial (Usman, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum modal sosial individu dan modal sosial area atau tempat kerja memiliki efek positif pada hasil kesehatan, tanpa melihat desain penelitian, pengaturan waktu tindak lanjut maupun jenis hasil kesehatan (Murayama, 2012).

4) Terdapat dua pengaruh modal sosial

a) Pengaruh positif

Coleman (2000) menunjukkan pengaruh modal sosial dalam keluarga dan dalam masyarakat dalam membantu terbentuknya modal manusia dalam wujud peningkatan derajat pendidikan. Baik modal sosial di dalam maupun di luar keluarga, di lingkungan sekolah, menunjukkan bukti tentang manfaat yang besar dalam mengurangi kemungkinan putus sekolah. Halpern (2005) mencatat

beberapa temuan yang terkait dengan dampak positif dari modal sosial yang kuat dalam keluarga terdapat prestasi pendidikan dan aspirasi pendidikan anak.

Menurut Serageldin dkk (1999) terdapat tiga dampak dari modal sosial yaitu: berbagi informasi, mengkoordinir kegiatan dan membuat keputusan bersama. Adger (2003) mengakui bahwa tindakan bersama memerlukan jaringan dan aliran informasi antar individu dengan kelompok untuk melumasi roda pengambilan keputusan. Menurut Adger, teori modal sosial menjelaskan bagaimana individu menggunakan hubungan-hubungan mereka di dalam jaringan sosial dengan para tokoh lain dalam masyarakat untuk kebaikan atau kesejahteraan dirinya atau bersama.

b) Pengaruh negatif

Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa modal sosial tidak hanya memiliki pengaruh yang positif tetapi juga berkemungkinan memiliki pengaruh negatif. Richard Rose menemukan bahwa jaringan sosial dapat membahayakan dalam masyarakat anti modern, yaitu suatu masyarakat yang ditandai oleh kegagalan organisasi dan korupsi organisasi formal (Slamet, 2012).

b. *Habitus*

Habitus merupakan suatu struktur kognitif yang memperatai individu dan realita sosial. Individu menggunakan *habitus* dalam berhubungan dengan realita sosial. *Habitus* merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu, berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. *Habitus* diindikasikan oleh skema-skema yang merupakan perwakilan konseptual dari benda-benda dalam realitas sosial. *Habitus* dapat dikatakan sebagai ketidaksadaran kultural, yakni pengaruh sejarah yang secara tidak sadar dianggap alamiah.

Habitus bagian dari hasil pembelajaran melalui pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga bentuk pendidikan masyarakat dalam arti yang sangat luas. *Habitus* memungkinkan manusia hidup dalam keseharian mereka secara spontan dan melakukan hubungan dengan pihak-pihak di luar dirinya. Perjalanan proses interaksi dengan pihak luar dapat terbentuk ranah dan jaringan relasi posisi objektif. Ranah merupakan metafora yang digunakan oleh Bourdieu untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang terstruktur dan dinamis dengan daya-daya yang dikandungnya (Harker, 2009).

16. Kemitraan dan sinergitas

a. Kemitraan

Menurut Tennyson dalam Wibisono (2007), kemitraan adalah kesepakatan antar sektor di mana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerja sama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, resiko maupun keuntungan ditanggung bersama dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerja sama.

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono (2007) merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

- 1) Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.
- 2) Transparansi, transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja, yang meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.
- 3) Saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Sulistiyani (2004) bahwa model kemitraan idealnya mencerminkan pembagian yang setara kepada tiga aktor pembangunan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Model kemitraan yang setara akan memberi citra positif bagi pemerintah dengan berlaku transparan dan mengembangkan kemitraan yang partisipatif.

Budimanta, Prasetijo dan Rudito (2004), mengibaratkan *corporate social responsibility* dan *good governance* sebagai dua sisi dari satu mata uang yang menjadikan masyarakat sebagai komunitas dan sebagai warga negara sebagai fokusnya serta pendekatan *Stakeholders* sebagai pelakunya. Konteks implementasi *corporate sosial responsibility*, partisipasi masing-masing *Stakeholders* sangat menentukan berjalannya usaha pengembangan masyarakat yang sekaligus juga memberikan keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat.

Lebih jauh mengenai prinsip kemitraan, Budimanta (2004) juga menjelaskan bahwa kemitraan memberikan keuntungan bersama, dan tidak menciptakan persaingan negatif yang berpengaruh pada keberlanjutan perusahaan. Kemitraan yang berwujud interaksi antar *Stakeholders* pada dasarnya merupakan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai muara dari *corporate sosial responsibility*. Pemberdayaan dimaksud sebagai upaya peningkatan kemampuan atau kualitas anggota-anggotanya yang tergabung dalam komuniti-komuniti untuk dapat bermitra dan berfungsi satu dengan lainnya sebagai keseluruhan anggota masyarakat. Konsep partisipasi menyangkut kesamaan dan kesepakatan program dalam struktur pengembangan yang sudah terpadu dan terencana dalam program *community development* yang dibangun secara bersama.

Tiga skenario kemitraan menurut Wibisono (2007), yaitu kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah maupun dengan komunitas atau masyarakat, yang terdiri dari:

1) Pola kemitraan kontra produktif

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan pemilik modal (*shareholders*) yaitu mengejar keuntungan (*profit*) sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka.

2) Pola kemitraan semi produktif

Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah di luar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat yang bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan rasa memiliki (*sense of belonging*) di pihak masyarakat dan *low benefit* di pihak pemerintah.

Kerja sama lebih mengedepankan aspek kariatif atau *public relation* di mana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek.

3) Pola kemitraan produktif

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subjek dan dalam paradigma kepentingan umum (*common interest*). Prinsip saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang

kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan berbasis sumber daya (*resource-based partnership*) di mana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*.

Dalam konteks kerja sama, pemerintah daerah dapat mengambil keuntungan berupa kemungkinan dana tambahan dan keahlian dari sektor privat, sedangkan sektor privat selain bisa mendapatkan keuntungan finansial juga bisa mendapatkan keuntungan dari promosi dan pengakuan akan tanggung jawab sosial dan etika bisnis mereka.

Kompleksitas model kemitraan dalam pembiayaan sektor privat dapat mendukung aktivitas sukarela yang berasosiasi dengan pemerintah dan pemerintah dapat memilih dan menyampaikan kebijakan melalui sektor sukarela dan mendapatkan dana dari hibah, jejaring pendanaan dan dukungan yang memfasilitasi pertukaran dana, keahlian dan komitmen. Dwiyanto (2004) menyebutkan tiga dimensi yang menjadi ciri *governance* yaitu sebagai berikut:

- 1) Dimensi kelembagaan di mana sistem administrasi dilaksanakan dengan melibatkan banyak pelaku (*multi Stakeholders*) baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah.
- 2) Dimensi nilai yang menjadi dasar tindakan administrasi lebih kompleks dari sekedar pencapaian efisiensi dan efektifitas namun lebih mengakomodir nilai-nilai universal seperti keadilan, partisipasi, kesetaraan, demokratisasi dan nilai-nilai lain yang terkandung dalam norma kehidupan masyarakat.
- 3) Dimensi proses, di mana proses administrasi merupakan suatu tindakan bersama yang dikembangkan dalam bentuk jaringan kerja untuk merespon tuntutan dan kebutuhan publik melalui upaya formulasi dan implementasi kebijakan publik.

Dwiyanto (2004) juga menekankan konsep *governance* pada pelaksanaan fungsi memerintah (*governing*) yang dilaksanakan secara bersama-sama (kolaborasi) oleh lembaga pemerintah, semi pemerintah, dan non pemerintah yang berlangsung setara (*balance*) dan multi arah (*participative*). Program-program pemberdayaan masyarakat apabila pelaksanaannya dihubungkan kemitraan maka dapat memiliki sebuah pengertian yang luas karena melibatkan pembagian kekuasaan, pekerjaan, dukungan dan/ atau informasi dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama dan/ atau keuntungan bersama.

Janet dalam Windiasih (2014) mengemukakan bahwa menurut sifat dan tingkat distribusi kekuasaan, pengelompokan kemitraan terdiri dari empat jenis yaitu kemitraan kolaborasi, kemitraan operasional, kemitraan kontributif dan kemitraan konsultatif. Dalam suatu hubungan kolaborasi, mitra sebuah organisasi pemerintahan dan sebuah organisasi di luar pemerintah, dapat memiliki kekuasaan pengambilan keputusan yang sama dan mereka berbagi dalam hal penggunaan sumber daya dan informasi untuk mencapai tujuan bersama. Mereka saling tergantung satu sama lainnya.

Kemitraan operasional lebih terpusat pada pembagian kerja dari pada kekuasaan pengambilan keputusan antara para pihak. Walaupun mereka memiliki tujuan yang sama, seorang mitra memiliki lebih banyak kontrol atas mitra yang lain dan langkah koordinasi yang cukup besar diperlukan untuk menyelaraskan proses tersebut. Untuk kemitraan kontributif, mereka mewakili sebuah organisasi, baik publik maupun swasta, dalam memberikan *sponsorship* atau dukungan, seringkali dalam bentuk pembiayaan, untuk sebuah aktivitas yang diorganisir oleh pihak-pihak. Para mitra yang memberikan kontribusi memainkan sebuah peran pinggiran (*periferal*) dalam proses pengambilan keputusan.

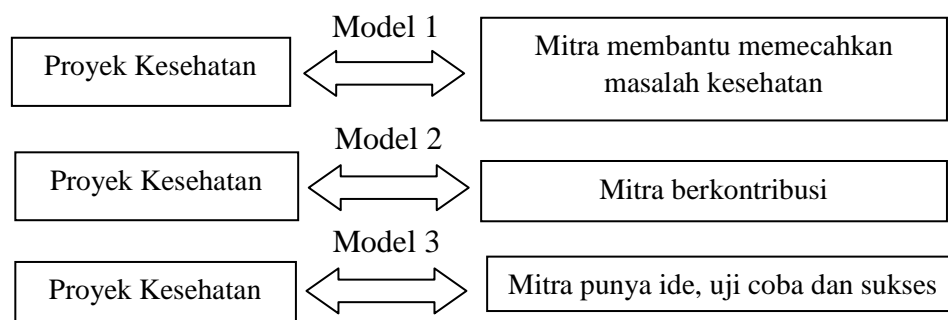
commit to user

Kemitraan konsultatif yaitu di mana organisasi pemerintahan memperoleh nasihat dari individu, kelompok dan organisasi dari luar pemerintah. Pemerintah tetap berada dalam pengawasan organisasi dan hanya mengandalkan mitra lain untuk memberikan informasi, ide-ide dan wawasan untuk meningkatkan penyampaian jasa. Reformasi tak dapat dihindarkan untuk semua jenis bisnis di dunia saat ini. Tekanan baik dari luar maupun dari dalam mendorong pemerintah untuk melihat cara yang ada untuk menyampaikan pelayanan dengan sebuah pertimbangan untuk menanggapi permintaan secara lebih baik.

Menurut Mardikanto (2010d), kemitraan bidang kesehatan meliputi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat serta kelompok profesional yang di bagi menjadi:

- 1) Kemitraan di dalam sektor: adalah kerjasama antara program-program yang ada dalam satu sektor
- 2) Kemitraan antar sektor: adalah kerjasama antara sektor-sektor pemerintahan di dalam melaksanakan kegiatan dengan tujuan yang disepakati bersama.
- 3) Kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat, dunia usaha dan kelompok profesi. Adalah kerjasama berbagai institusi dalam melakukan kegiatan, sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

Beberapa contoh model kemitraan kesehatan, seperti gambar di bawah ini:



commit to user

Gambar 2.3 Contoh Model Kemitraan Kesehatan (Mardikanto, 2010d)

Model tersebut di atas dapat dikembangkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan yang bersifat lokal serta khusus. Penerapan kemitraan di lapangan, sangat mungkin untuk menerapkan gabungan dari berbagai model kemitraan tersebut di atas untuk setiap desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan antar provinsi.

b. Sinergi

Menurut Covey (2013) bahwa sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan guna mencapai hasil yang lebih besar dari jumlah bagian per bagian. Hampden-Turner (1990) juga menyatakan aktivitas sinergi merupakan suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan cara melibatkan berbagai aktivitas yang berjalan bersama sehingga. Sinergi memang merupakan kata yang mudah diucapkan akan tetapi sulit dapat diterapkan. Sering kali terdengar kata-kata sinergi yang keluar sengaja atau tidak sengaja dalam diskusi kelompok, rapat koordinasi atau pertemuan lain yang bersifat formal. Sinergi adalah bentuk kerjasama *win-win solution* yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah.

Sinergi merupakan hasil dari suatu relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan. Kemudian Hartanto (1996) menyatakan sinergi adalah suatu gagasan baru yang dibentuk oleh berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan suatu gagasan baru, yang dilandasi oleh pola pikir atau konsep yang baru. Dalam setiap kelompok kerja dalam organisasi, kualitas sinergi yang merupakan sinergi efektif pada hakekatnya adalah hasil dari suatu proses perpaduan dari cara-cara bagaimana mengatasi masalah dan perpaduan gagasan yang dijalankan oleh pihak-pihak yang saling percaya dan bersikap saling mendukung menghasilkan suatu gagasan

baru yang benar-benar memberikan kepuasan secara intrinsik bagi semua belah pihak. Untuk memperoleh gagasan baru dan kepuasan harus dibarengi dengan kerjasama yang efektif dari semua pihak. (Salusu, 2004).

Pengertian kualitas sinergi sebagai kualitas hasil kerjasama yang kritikal adalah senada dengan kualitas kerjasama dalam proses kolaboratif seperti yang diutarakan oleh Gray (1996) dan Bennis & Biederman (1997) sebagai *creative collaboration*, yang menggambarkan kerjasama yang dapat menghasilkan lebih dari apa yang diperkirakan oleh siapapun. Sesungguhnya teori sinergi (*synergy*) mengacu pada gaya manajemen sinergi dalam organisasi yaitu senantiasa menciptakan harmonis. Dengan demikian maka secara langsung sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan tumbuh menjadi wadah sinergi yang efisien, berkualitas, fleksibel dan inovatif. Oleh sebab itu, wadah sinergi sebagai ciri kerjasama kemitraan harus senantiasa dikembangkan secara dinamis sesuai dengan konsep "*learning organization*" mengikuti trend atau perkembangan lingkungan strategis (Senge, 2006).

Silower (1998) dalam buku "*Synergy Trap*" mengemukakan dasar-dasar sinergi yang terdiri dari visi strategis, strategi budaya, kekuasaan dan budaya, integrasi sistem dan investasi awal untuk memperoleh imbalan sebagai premium. Keempat komponen itu mewakili unsur-unsur utama dari suatu strategi kerjasama atau kemitraan yang harus berada pada posisinya. Dalam hal ini, komponen sinergi yang dimaksud dikelompokkan menjadi antar Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dari beberapa pengertian sinergi tersebut dapat diketahui orientasi konsep bersinergi di antaranya yaitu berorientasi pada hasil dan positif, perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigm kebersamaan dan saling bekerjasama dan bertujuan yang sama. Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil

lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama.

Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat dan bersedia saling berbagi. Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, tidak berpikir menang sendiri dan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan. Bersinergi bertujuan memadukan bagian-bagian yang terpisah. efek sinergi yang dapat dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan individu serta perusahaan yang bekerja sama atau menggabungkan dapat diidentifikasi dari tiga perspektif utama: (1) sumber daya, (2) pasar, (3) sektor terkait konsep sinergi ini juga diadaptasi oleh para ahli dalam lingkup kebijakan bisnis dan didefinisikan sebagai suatu efek yang dapat menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dari kombinasi berbagai sumber daya organisasi yang nilainya lebih besar dari jumlah nilai masing-masing bagiannya. Efek sinergitas dapat dicapai terutama karena menggabungkan beberapa sumber daya yang saling melengkapi, pada suatu perusahaan dapat mengembangkan sumber daya yang sebelumnya atau menemukan sumber daya baru. Penggabungan sumber daya yang serupa, misalnya rentang geografis dalam suatu mata rantai tertentu. Rantai nilai pada waktunya akan mendukung pencapaian skala, pencapaian cakupan dan merupakan efek dari jaringan (Blaszczyk, 2018).

17. Pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul

a. Penyebab tingginya kejadian pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan hasil pengamatan dari peneliti, penyebab dari tingginya kejadian pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul adalah (1) karena masih kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi remaja, (2) letak geografis tempat tinggal remaja, (3) kehamilan yang tidak diinginkan, (3) adat atau budaya setempat

yang salah satunya adanya adat “nyekseni”, (4) faktor ekonomi (Tany, 2015; Mubasyaroh, 2016).

Hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa tingginya angka kejadian pernikahan dini disebabkan oleh maraknya kehamilan di luar nikah. Para remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah oleh orangtuanya dipaksa untuk mengundurkan diri dari sekolah dan segera melangsungkan pernikahan dengan alasan untuk menutupi aib atau rasa malu. Proses pernikahan remaja yang hamil di luar nikah diajukan melalui putusan pengadilan agama Kabupaten Gunungkidul.

b. Upaya pencegahan pernikahan dini

1) Deklarasi Dukuh

Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kecamatan yang cukup tinggi angka pernikahan dininya. Berdasarkan inisiasi pihak KUA Gedangsari, maka disusunlah program penanggulangan perkawinan di bawah umur dengan mencetuskan program keputusan bersama 2013 dan deklarasi dukuh pada tahun 2014.

Kesepakatan bersama menggerakkan pencegahan pernikahan di bawah umur pada level kelembagaan dengan melibatkan *Stakeholder* dengan kepatuhan hukum dan otoritas secara paksa. Deklarasi para kepala padukuhan tahun 2014 menggerakkan pencegahan nikah di bawah umur pada tingkat kultural masyarakat dengan kepatuhan hukum dan pemegang otoritas yang dipatuhi secara sukarela. Dukuh merupakan salah satu tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan secara kultural dengan seluruh warga dan sebagai *agent change of law*.

Dukuh bertanggung jawab terhadap tegaknya hukum di masyarakatnya. Dengan kata lain, jika tidak berhasil melaksanakan pencegahan pernikahan dini, maka dukuh tersebut akan malu di forum evaluasi karena citranya menjadi tidak

bagus, begitu juga sebaliknya, jika dukuh dapat melakukan pencegahan pernikahan di bawah umur maka akan mendapatkan citra yang baik di masyarakat luas. Keputusan bersama dan deklarasi para kepala padukuhan di Kecamatan Gedangsari ini menjadi contoh bagi daerah atau kecamatan-kecamatan di Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pencegahan pernikahan dini (Furi, 2017).

2) Gerakan pencegahan pernikahan usia dini melalui lirik ayunda si menik

Lirik lagu “Ayunda Si Menik” merupakan salah satu upaya dari kepala kantor urusan agama Kecamatan Gedangsari untuk mengalihkan kejenuhan ceramah yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini. Dengan lirik lagu ini akan selalu mengingatkan akan cita-cita dari Kabupaten Gunungkidul khususnya daerah Gedangsari. Inti pesan lagu Ayunda Si Menik dengan menggenggam cita-cita untuk menunda menikah menuju rumah tangga bahagia. Gerakan pencegahan pernikahan usia dini dianggap lebih efektif, melalui pesan lagu ketimbang melalui ceramah.

“Masa yang indah jangan cepat berlalu, tunas yang kuat tak kan pernah layu, tekad dan juang terus dipacu fajar seberang yang hendak dituju, ayunkan langkah tak banyak bertingkah, hasrat membara awas jangan lengah, sejuta rayuan goda menikah semua hadang masa depan indah,

Reff: jangan mengganggu dan jangan merayu, semuanya palsu jangan buru-buru impian hidup penuh lika-liku, tetapi pasti kita terus maju, marilah kawan genggam cita-cita menunda nikah usia dewasa, marilah kawan kejar cita-cita mengukir masa depan bahagia (2x)”

3) Peraturan Bupati Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang memiliki peraturan bupati mengenai pencegahan pernikahan dini. Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan dini dapat menjadi inovasi yang baik. Peraturan bupati tersebut mempunyai tujuan: mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, mencegah terjadinya tindakan kekerasan pada anak, mencegah terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meningkatkan kualitas kesehatan ibu anak, mencegah putus sekolah dan menurunkan angka kemiskinan, sasaran dalam peraturan bupati ini adalah untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan peraturan bupati ini dapat memberikan pemahaman terhadap orang tua khususnya, jika orang tua melakukan kekerasan, dalam hal ini adalah pemaksaan pernikahan dini, maka orang tua tersebut dapat dipidanakan. Dengan pemahaman inilah dapat merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya penundaan usia pernikahan.

4) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh remaja, menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan PKPR adalah untuk optimalisasi pelayanan kesehatan remaja di puskesmas. Jenis kegiatan dalam PKPR yaitu:

- a) Pemberian informasi dan edukasi: dilaksanakan di dalam gedung atau di luar gedung, secara perorangan atau berkelompok, dapat dilaksanakan oleh guru, pendidik

sebaya yang terlatih dari sekolah atau dari lintas sektoral terkait dengan menggunakan materi dari atau puskesmas, menggunakan metode ceramah tanya jawab, *Focus Group Discussion* (FGD), atau diskusi interaktif, yang dilengkapi dengan alat bantu media cetak atau media elektronik serta menggunakan sarana komunikasi, edukasi dan informasi yang lengkap.

- b) Pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan penunjang dan rujukannya.
- c) Konseling, tujuan konseling dalam PKPR adalah membantu klien dapat mengenali masalahnya dan membantu agar dapat mengambil keputusan serta memberikan pengetahuan, keterampilan, penggalan potensi dan sumber daya secara berkesinambungan.

- d) Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS)

Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS) merupakan adaptasi dari *Life Skills Education* (LSE), adalah kemampuan psikososial seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Keterampilan ini mempunyai peran penting dalam promosi kesehatan di lingkup yang luas, yaitu kesehatan fisik, mental dan sosial.

- e) Pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya, pelatihan ini merupakan salah satu upaya nyata mengikut sertakan remaja sebagai salah satu syarat keberhasilan PKPR. Dengan melatih remaja menjadi kader kesehatan remaja yang lazim disebut pendidik sebaya.
- f) Pelayanan rujukan, sesuai kebutuhan, puskesmas sebagai bagian dari pelayanan klinis medis, melaksanakan rujukan kasus ke pelayanan medis yang lebih tinggi. Rujukan sosial juga diperlukan dalam PKPR (Kemenkes RI, 2014).

5) Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)

Salah satu usaha dalam rangka peningkatan kualitas remaja di Indonesia, perlu diupayakan melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. PIK R dapat dilaksanakan dan dikembangkan di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta.

Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, Triad KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), ketrampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan *advocacy* dan Konseling Informasi dan Edukasi (KIE) (BKKBN, 2012).

B. Kerangka Berfikir

1. Hasil studi pendahuluan

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdapat 18 kecamatan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan dinas kesehatan oleh kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi Kabupaten Gunungkidul mengatakan sangat prihatin karena data persalinan remaja masih tinggi, bahkan tertinggi di DIY. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah Gunungkidul. Upaya tersebut antara lain dengan diterbitkannya peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang pencegahan pernikahan dini Nomor 36 Tahun 2015. Peraturan ini diterbitkan karena di beberapa kecamatan di Kabupaten Gunungkidul masih banyak yang melakukan pernikahan dini.

Penyebab dari pernikahan dini bermacam-macam, antara lain karena hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan dari unsur agama

misalnya takut terjadi zina. Sebagai contoh salah satu warga menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah 18 tahun karena sebagai orang tua merasa takut jika terjadi zina atau kehamilan di luar nikah. Dengan pernikahan dini tersebut secara otomatis remaja laki-laki dan remaja putri yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama harus mengalami putus sekolah karena menikah. Dari dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Gunungkidul sebenarnya menyerahkan sepenuhnya kebijakan terhadap siswanya yang mengalami hamil di luar nikah ataupun terjadi pernikahan dini pada sekolah masing-masing karena status mereka yang masih aktif sebagai siswa siswi sekolah menengah pertama maupun menengah atas.

Sanksi untuk mereka yang mengalami kehamilan di luar nikah atau karena alasan yang lain sehingga terjadi pernikahan dini menjadi otonomi dari masing-masing sekolah. Pergaulan bebas yang terjadi pada anak-anak tersebut tidak lepas peran dari sekolah maupun dari pihak orang tua. Kasus yang terjadi di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul mencerminkan bahwa orang tua kurang berperan dalam pengawasan pada anak perempuannya. Mereka mengetahui anak perempuannya hamil setelah proses persalinan berlangsung. Pihak sekolah tidak mengetahui hal tersebut karena siswinya dapat menutupi kehamilannya, dan sangat terkejut dengan berita jika salah satu siswinya sedang dalam proses persalinan di puskesmas setempat.

Kehamilan di luar nikah memaksa seorang remaja untuk menjadi ibu muda, dan dia harus keluar dari sekolah untuk mengurus anak dan suaminya. Dengan status ekonomi yang belum mapan dari suami, maka pasangan muda tersebut menjadi beban dari orangtuanya, mulai dari kebutuhan untuk makan sehari-hari maupun pemenuhan kebutuhan bagi anaknya. Masalah berikutnya yang muncul, tidak hanya pada hal ekonomi saja, karena dari faktor psikologis belum siap maka sering terjadi percekcoakan antara pasangan suami istri muda tersebut.

Meruncingnya masalah dan seringnya terjadi pertengkaran diantara mereka sampai terjadi perceraian.

Fenomena pernikahan dini menjadi masalah tersendiri bagi Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah daerah melalui kementerian agama kabupaten sudah melakukan upaya-upaya *preventive* yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah berupa edukasi secara langsung ke sekolah-sekolah. Akan tetapi diakui dari pihak departemen agama, belum semua sekolah terjangkau oleh edukasi tersebut dengan alasan minimnya anggaran untuk dapat melakukan ke seluruh sekolah-sekolah. Minimnya anggaran membuat kementerian agama memilih sekolah-sekolah yang mempunyai murid terbanyak di masing-masing kecamatan. Selain upaya tersebut, salah satu kepala KUA berusaha mencari cara lain untuk dapat menyampaikan informasi tentang pendewasaan usia perkawinan yaitu dengan cara menciptakan lirik lagu yang berjudul “Ayunda Si Menik”. Lirik tersebut mengajak para remaja untuk menunda pernikahan sampai usia yang matang demi masa depan mereka sendiri. Dari dinas kesehatan juga telah berupaya melakukan intervensi untuk mengurangi pernikahan dini, antara lain dengan pelayanan PKPR di tingkat puskesmas dari masing-masing kecamatan. PKPR merupakan pelayanan kesehatan peduli remaja, melayani semua remaja dalam bentuk konseling dan berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan remaja. Pelayanan PKPR dibuka hingga sore hari, hal ini dilakukan karena para remaja di pagi hari mereka sibuk sekolah, dengan dibukanya PKPR sore hari, harapannya pelayanan dapat optimal pada remaja karena tidak mengganggu waktu sekolah. Walaupun sudah membuka pelayanan sampai sore hari tetapi pelayanan PKPR tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal karena peminatnya sedikit.

Upaya pencegahan pernikahan dini juga dilakukan oleh dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Gunungkidul. Melalui sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gunungkidul melakukan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan. Kegiatan tersebut merupakan

kegiatan rutin tiap semester dan mengundang wali murid untuk dapat bekerja sama mewujudkan pendewasaan usia perkawinan. Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga juga sangat memberikan kelonggaran, pada siswa yang mengalami kehamilan di luar nikah, jika sudah menjelang ujian akhir, mereka tetap bisa mengikuti ujian akhir di sekolah agar dapat menyelesaikan sekolahnya. Tetapi siswanya sendiri terkadang tidak mau untuk mengikuti ujian tersebut dikarenakan malu kondisinya yang sedang hamil. Mereka lebih memilih *drop out* dan menjadi ibu muda.

Salah satu desa dengan angka pernikahan dini tertinggi adalah Desa Sawahan Kecamatan Ponjong Gunungkidul Yogyakarta. Penyebab terjadinya banyaknya kejadian pernikahan dini karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga banyak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan sehingga terpaksa harus menikah di usia muda dan putus sekolah. Kehamilan yang tidak diinginkan terjadi pada keluarga yang kurang pengawasannya oleh orang tua meskipun mereka tinggal satu rumah dan pekerjaan orang tua petani yang setiap harinya bekerja di sawah. Pasangan remaja tersebut sudah berpacaran sejak SMP semester akhir dan melakukan hubungan seksual di sawah, karena banyak gubuk di sawah serta sepi tempatnya. Orang tua tidak tau kejadian tersebut, pulang tidak sesuai dengan waktu sekolah.

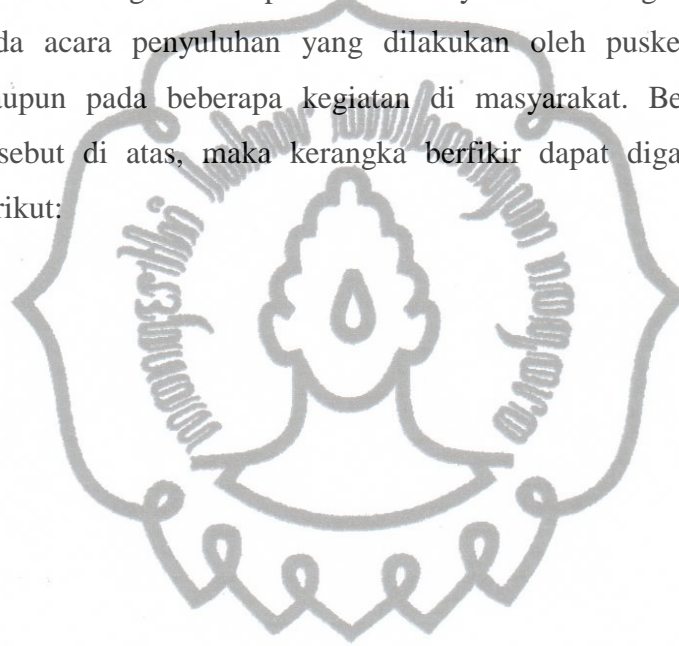
Terdapat juga dari keluarga yang anak tersebut hanya dititipkan orangtuanya pada simbahnya, dan orang tua pergi merantau untuk mencari nafkah. Pernikahan dini terjadi juga karena terdapat riwayat orang tua yang juga melakukan pernikahan dini, tidak mementingkan pendidikannya sehingga mereka mayoritas hanya berpendidikan SD. Pengaruh dari teman-teman sebayanya, baik teman sekaligus tetangga dan teman sekolah banyak dari mereka melakukan seks bebas dan dianggap biasa dan mereka mempunyai pacar sejak duduk dibangku sekolah menengah pertama. Di sekolah pemberdayaan siswa melalui wadah mereka yang disebut dengan pusat informasi dan konseling

kesehatan reproduksi belum terlaksana secara optimal, bahkan tidak berjalan sama sekali.

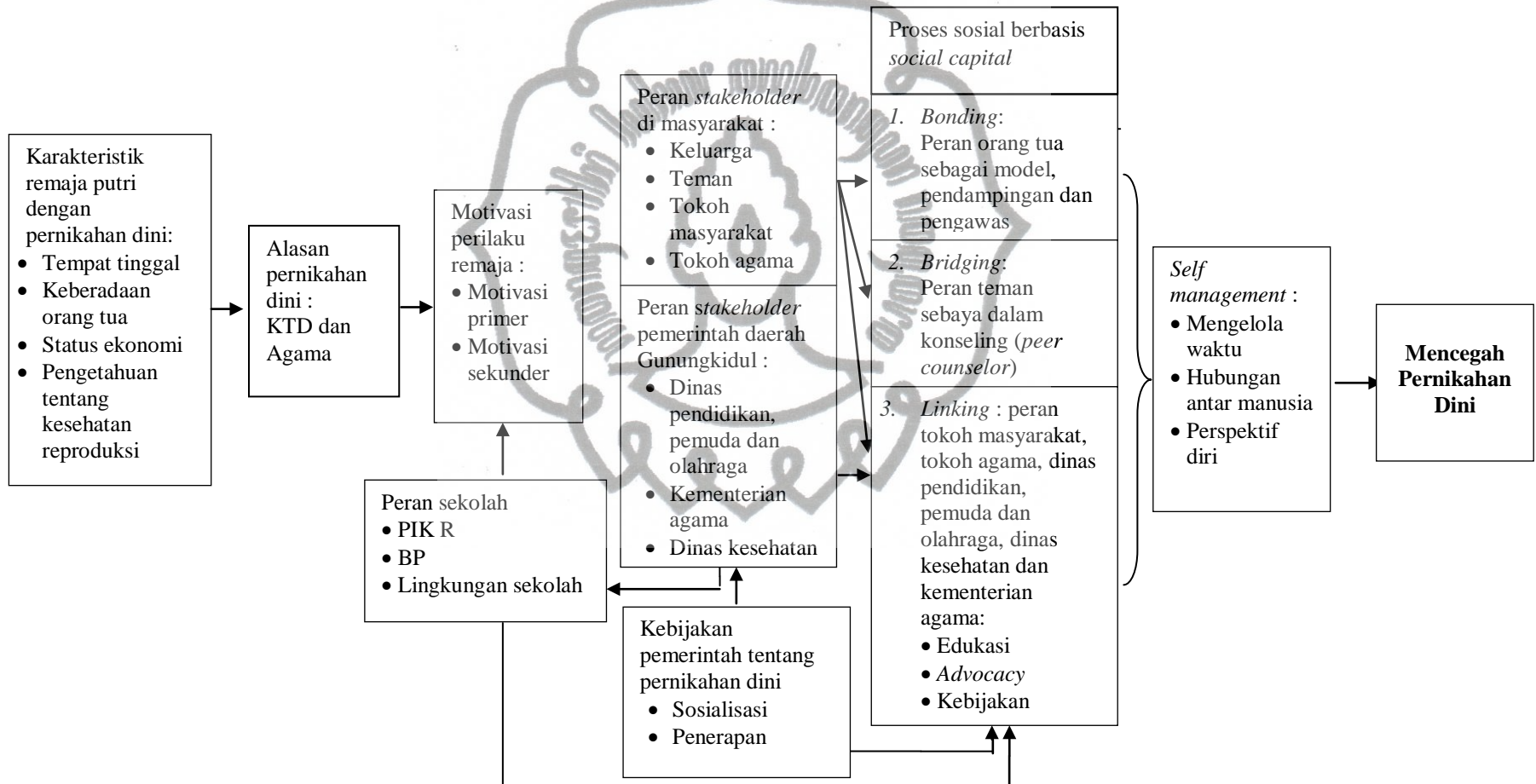
Proses belajar remaja di sekolah juga belum terdapat muatan lokal tentang kesehatan reproduksi. Informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi yang didapatkan remaja di sekolah hanya sebatas penyuluhan yang dilakukan oleh dinas kesehatan melalui puskesmas bekerjasama dengan pihak sekolah pada saat Masa Orientasi Sekolah (MOS) atau setelah ujian semester 1 dan selama 3 tahun hanya sekali itu saja mendapatkan penyuluhan. Peserta penyuluhan terdiri dari petugas PKPR dari Puskesmas, guru UKS/BP dan siswa siswi. Materi penyuluhan antara lain tentang infeksi menular seksual, pernikahan dini, seks bebas dan tentang kesehatan reproduksi remaja secara umum. Sangat disayangkan sekali terkadang penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dianggap tabu sehingga kurang mendapatkan sambutan dari pihak sekolah. Bagi siswa yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) jika sudah diakhir pendidikan masih diperbolehkan mengikuti ujian akhir, tetapi jika kejadiannya pada pertengahan proses belajar atau di awal proses pembelajaran, maka anak tersebut mengundurkan diri karena merasa malu dengan keadaanya.

Penyebab pernikahan dini tidak lepas dari faktor budaya yang ada dimasyarakat. Sebagian orang tua yang menganggap bahwa pendidikan wanita tidak perlu tinggi-tinggi dan yang sudah *menarche* berarti sudah sepantasnya untuk menikah. Jika mempunyai anak perempuan dan sudah berumur 15 tahun, jika belum punya pacar atau belum ada yang melamar merasa malu dan mempunyai kebanggaan tersendiri jika di usia tersebut sudah punya pacar atau ada yang melamar karena dengan pernikahan tersebut harapannya dapat meningkatkan status ekonomi dari pihak perempuan. Menjadi kebanggaan tersendiri jika pihak perempuan menikah dengan orang kaya walaupun secara usia masih di bawah umur (usia anak-anak). Peran tokoh masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini belum optimal, hal ini terbukti bahwa tokoh masyarakat dan tokoh

agama untuk kegiatan pencegahan baru sebatas himbauan saja kepada warganya untuk tidak melakukan pernikahan dini. Belum ada kegiatan secara mandiri untuk melakukan pencegahan pernikahan dini karena masih menganggap hal itu wajar. Jika sudah terjadi kehamilan tidak diinginkan, maka para tokoh masyarakat membantu agar pasangan tersebut untuk segera dinikahkan dengan memberikan dispensasi nikah. Para tokoh agama maupun tokoh masyarakat kadang mereka bergabung pada acara penyuluhan yang dilakukan oleh puskesmas di sekolah maupun pada beberapa kegiatan di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:



2. Gambar kerangka berfikir, sebagai berikut :



Gambar 2.4 Kerangka Berfikir

Sesuai dengan gambar tersebut di atas maka penjelasan dari kerangka berfikir adalah, sebagai berikut:

a. Karakteristik remaja putri yang mengalami pernikahan dini

Banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, para pelakunya memiliki karakteristik antara lain secara geografis lokasi rumah terletak didaerah pedesaan dan cukup jauh dari daerah perkotaan, dan berbukit-bukit. Mereka tinggal bersama kedua orangtuanya, tetapi salah satu orangtuanya bekerja di luar Kabupaten Gunungkidul untuk mencari nafkah. Namun ada juga yang kedua orangtuanya merantau keluar daerah, sehingga menitipkan anaknya pada keluarga yang lain, misalnya pada kakek, nenek atau pakdhe, budhe bahkan keluarga besar lainnya.

Kondisi ekonomi, para pelaku pernikahan dini berasal dari keluarga menengah ke bawah, sehingga keluarga merasa senang jika ada yang membantu secara materi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan dibantu secara ekonomi, membuat mereka nyaman. Faktor lain yang menyebabkan pernikahan dini adalah kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Hal ini tercermin dari perilaku mereka yang cenderung mudah untuk dibujuk melakukan hubungan seksual pada saat pacaran. Pemahaman yang setengah-setengah, mengakibatkan salah dalam persepsi. Sebagai contoh, mereka meyakini jika hanya satu kali melakukan hubungan seksual tidak akan terjadi kehamilan. Bahkan menganggap jika melakukan hubungan seksual di usia muda, keprawanannya dapat kembali lagi. Beberapa faktor tersebut yang menyebabkan banyaknya terjadi kehamilan di luar nikah.

b. Alasan para remaja putri melakukan pernikahan dini

Alasan para remaja melakukan pernikahan dini, karena sudah terlanjur terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Mereka menikah karena terpaksa, *commit to user* sehubungan dengan semakin membesarnya usia

kandungan serta untuk menutupi rasa malu keluarga. Sebagian warga masyarakat menganggap para remaja yang telah berusia 15 tahun sudah seharusnya memiliki pasangan, dan jika mereka mendapatkan jodoh orang kaya, maka status ekonomi keluarga ikut terangkat.

- c. Motivasi remaja putri yang mengalami pernikahan dini memiliki pacar

Motivasi remaja memiliki teman dekat atau pacar hanya karena merasa kurang dekat dengan keluarga dan tidak ada teman main ataupun untuk curhat, sehingga mereka nyaman jika punya pacar, karena mendapatkan perhatian, teman main dan sering diberikan uang jajan.

- d. Peran sekolah untuk mencegah pernikahan dini

Peran sekolah dalam membentuk karakter remaja sangat penting, karena sebagian besar remaja menghabiskan waktunya di sekolah. Upaya sekolah dalam mencegah perilaku negatif pada siswa siswinya, antara lain dengan optimalisasi peran guru, kegiatan PIK R, *peer counselor* dan padatnya jadwal pembelajaran di sekolah. Peningkatan pengetahuan siswa siswinya tentang kesehatan reproduksi merupakan prioritas utama. Tetapi materi kesehatan reproduksi belum masuk ke dalam muatan lokal sekolah. Pihak sekolah melakukan kerjasama dengan puskesmas, agar dapat memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi.

- e. Peran *Stakeholder* di masyarakat, *Stakeholder* pemerintah daerah dalam proses sosial

Peran *Stakeholder* di masyarakat dirasakan belum optimal, karena orang tua masih kurang pengawasan terhadap anak dan peran teman belum dapat memberikan suatu pengaruh yang signifikan karena para remaja putri yang mengalami pernikahan dini cenderung tertutup dan tidak dekat dengan teman-temannya. Sedangkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat baru sebatas himbauan kepada warga agar tidak melakukan pernikahan dini. Himbauan tersebut

hanya disampaikan melalui acara-acara rutin bulanan yang diselenggarakan oleh desa atau dusun.

Peran *Stakeholder* pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, melakukan sosialisasi tentang peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan dini. Peraturan tersebut jelas dituliskan bahwa, untuk melakukan pencegahan pernikahan dini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Proses sosial berbasis modal sosial, keterlibatan kelompok masyarakat terkecil (keluarga) sebagai *bonding* remaja merupakan modal awal untuk dapat membentuk karakter remaja. Keberadaan teman dalam kehidupan sehari-hari dapat sebagai *bridging* atau jembatan agar mendapatkan banyak informasi, edukasi ataupun hanya sekedar sebagai teman curhat. *Linking* pada proses sosial ini, merupakan kerjasama antara para tokoh masyarakat dan pemerintah. Kerjasama tersebut terwujud dalam peningkatan pengetahuan, dukungan-dukungan maupun terbitnya beberapa kebijakan terkait pencegahan pernikahan dini.

f. *Self management*

Berdasarkan kasus-kasus pernikahan dini dan proses sosial berbasis *social capital* yang terjadi, seharusnya para remaja dapat melakukan control diri atau melakukan *self management*. Kontrol diri ini dapat melalui pengelolaan waktu yang baik sebagai seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengatur hubungan antar manusia dalam pergaulannya sehari-hari dan mempunyai perspektif diri yang baik agar memiliki rasa percaya diri untuk dapat mewujudkan cita-citanya. Para remaja tidak mengedepankan emosi dalam proses perkembangannya, sehingga dapat mencegah perilaku negatif yang kemungkinan muncul khususnya perilaku seksual, dengan demikian kehamilan yang tidak diinginkan dapat dihindari dan pernikahan dinipun tidak terjadi.

C. Dimensi Penelitian

1. Karakteristik remaja

Gambaran tentang bagaimana ciri-ciri ataupun kondisi dari para remaja putri yang telah melakukan pernikahan dini.

2. Kejadian pernikahan dini

Gambaran tentang kronologi bagaimana proses terjadinya pernikahan dini pada remaja putri.

3. Motivasi perilaku remaja

Alasan para remaja putri yang mengalami pernikahan dini memiliki teman dekat lawan jenis atau pacar sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.

4. Peran sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan dini

Tugas dan fungsi sekolah selama proses pembelajaran yang melibatkan guru serta para siswa di sekolah menengah pertama agar para siswa siswinya dapat terhindar dari perilaku seksual yang menyimpang.

5. Kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini

Berbagai kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan sebagai suatu bentuk regulasi untuk dapat mencegah pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul.

6. *Stakeholder*

Peran individu atau berkelompok yang memiliki beberapa kepentingan yang berbeda dan dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik atau tujuan.

7. *Social capital*

Kumpulan sumber daya masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang terkait dengan pernikahan dini dan saling berhubungan. Dilihat dari *bonding*, *bridging* dan *linking*.

8. *Self management*

Kemampuan diri sendiri untuk mencapai perilaku yang baik dengan *self management*. *Self management* tersebut dapat dilihat dari pengendalian perasaan dengan memunculkan hal yang positif pada diri sendiri dan pengendalian emosi.

